



RAPBN 2020

Untuk Akselerasi Daya Saing
melalui Inovasi dan Penguatan
Kualitas Sumber Daya Manusia



4TH

SDM UNGGUL
INDONESIA MAJU

**Rapat Kerja
Badan Anggaran DPR RI**

28 Agustus 2019



Hal Baru Dan Strategis



Beberapa kebijakan dan inisiatif dalam RAPBN 2020 untuk meningkatkan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing



Insentif Perpajakan dalam rangka Mendukung peningkatan Sumber Daya Manusia dan daya saing

- *Super deduction* untuk kegiatan vokasi & litbang
- *Mini tax holiday* untuk investasi di bawah Rp500 miliar
- *Investment allowance* untuk industri padat karya



Peningkatan Kualitas SDM dan Perlindungan Sosial

KIP Kuliah

mendukung kelanjutan pendidikan masyarakat miskin ke jenjang yang lebih tinggi

Kartu Pra Kerja

untuk Peningkatan Produktivitas Bagi Pencari Kerja

Kartu Sembako

mendukung penguatan perlindungan masyarakat miskin akan akses pangan



Percepatan penyelesaian 4 destinasi pariwisata super prioritas

Pengembangan destinasi wisata Danau Toba, Borobudur, Labuan Bajo dan Mandalika dengan Sinergi lintas K/L dan Pemda



Hal Baru Dan Strategis

Beberapa kebijakan dan inisiatif dalam RAPBN 2020 untuk meningkatkan penguatan kualitas Sumber Daya Manusia dan Daya Saing



Penguatan Transfer ke Daerah dan Dana Desa

- Penguatan DAK Fisik pada 2 bidang baru: sosial dan transportasi laut;
- Pengalokasian DAU Tambahan untuk penyetaraan penghasilan tetap (siltap) perangkat desa dan penggajian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)



Dana Abadi untuk SDM dan Kebudayaan

Pemanfaatan hasil investasi dana abadi untuk meningkatkan antara lain pemajuan kebudayaan nasional, dan peningkatan kualitas perguruan tinggi, melalui:

- ☐ Dana Abadi Kebudayaan
- ☐ Dana Abadi Perguruan Tinggi
- ☐ Penambahan Dana Abadi Riset secara signifikan



Penguatan Neraca Transaksi Berjalan

mendukung penurunan defisit transaksi berjalan baik dalam jangka panjang maupun jangka pendek



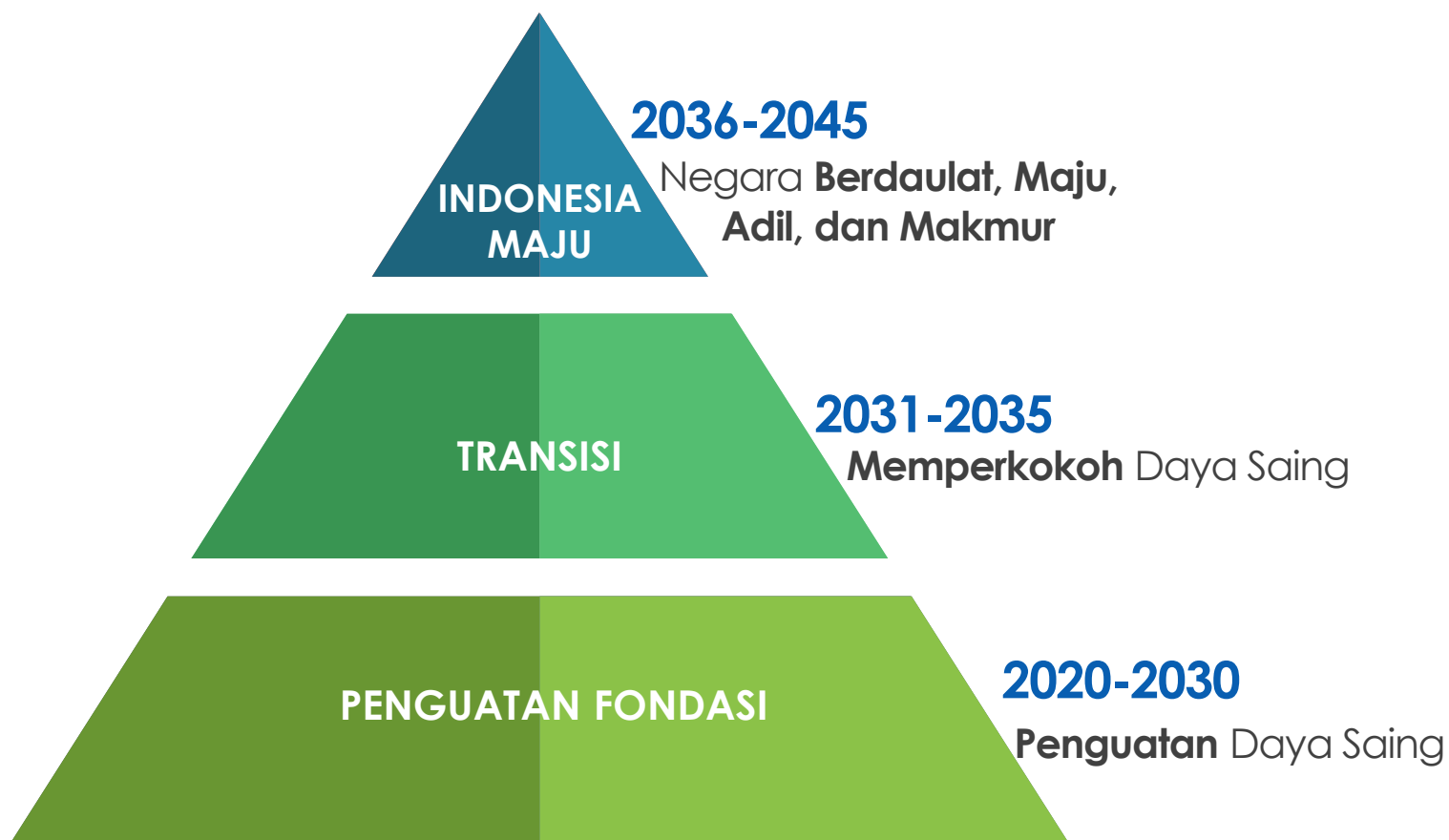
1 Kerangka Ekonomi Makro Tahun 2020



Tahun 2020 Sebagai Awal Tahapan Jangka Menengah Pertama Menuju Pencapaian Visi Indonesia 2045



Indonesia 2045: Menjadi Negara Maju



Tema Kebijakan Fiskal 2020
“APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas SDM”

STRATEGI KEBIJAKAN FISKAL TAHUN 2020



Mobilisasi Pendapatan



Belanja negara yang efektif



Pembiayaan yang kreatif



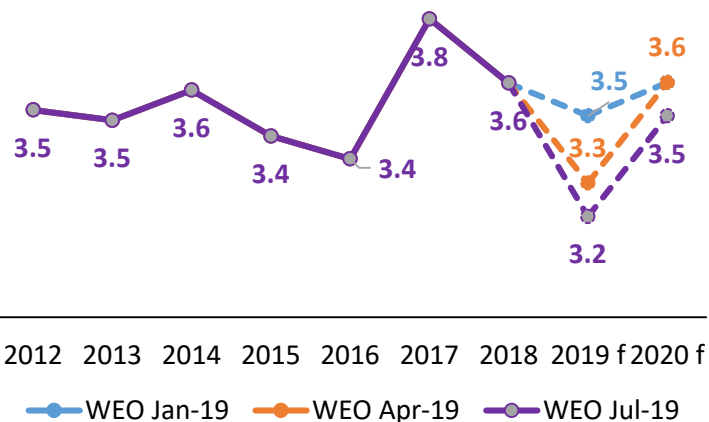
PEREKONOMIAN NASIONAL DIHADAPKAN PADA TANTANGAN PEREKONOMIAN DUNIA YANG MASIH LEMAH



Proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2019-2020 direvisi ke bawah

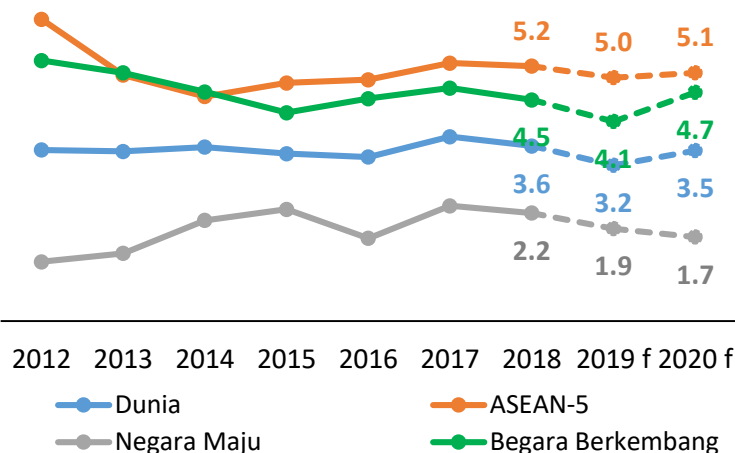
Revisi Proyeksi IMF dalam World Economic Outlook Juli 2019

Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global (%)

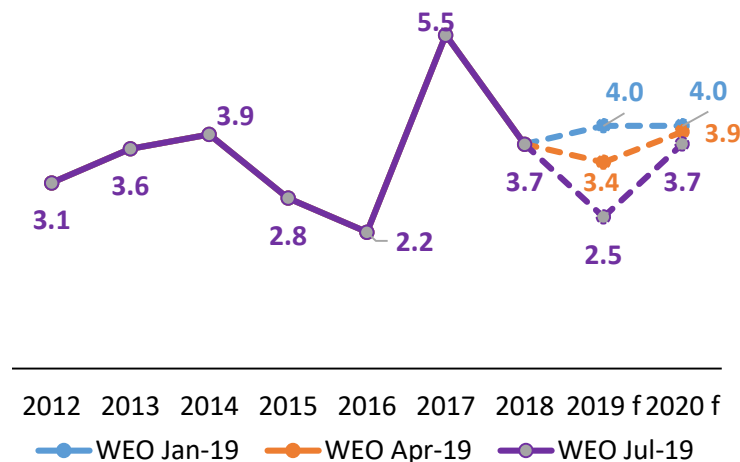


Sumber: IMF WEO

Pertumbuhan Ekonomi Kelompok Negara (%)



Pertumbuhan Volume Perdagangan Global (%)



IMF dalam **WEO Juli 2019**, kembali merevisi pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2019-2020 menjadi 3,2% dan 3,5%, **lebih rendah 0,1%** dibandingkan dengan proyeksi sebelumnya.

- **Prospek ekonomi global masih menghadapi risiko ketidakpastian yang bersumber dari :**
 - i. Kebijakan ekonomi dan moneter Amerika Serikat
 - ii. Risiko perang dagang yang masih berlanjut antara AS-Tiongkok
 - iii. Ketidakpastian zona Eropa (a.l Brexit) dan geopolitik global
- Faktor tersebut turut berimbas pada **menurunnya prospek permintaan global dan kinerja perdagangan global**



Ketidakpastian Global Cenderung meningkat memasuki semester II 2019

menciptakan tekanan terhadap nilai tukar Negara berkembang

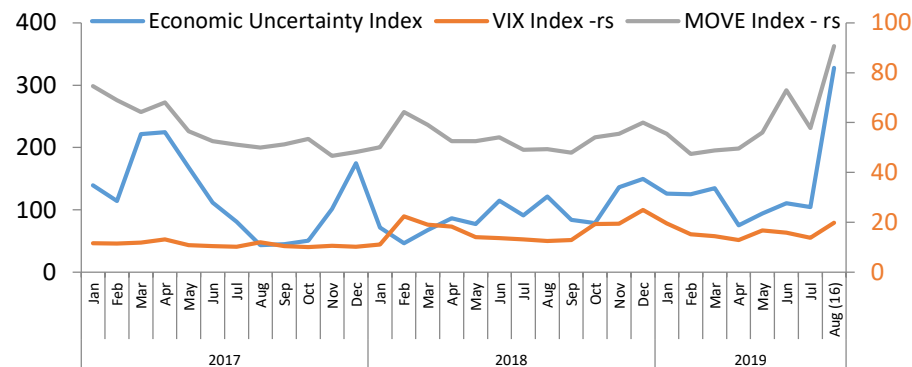


Perkiraan melambatnya perekonomian dan tensi perang dagang meningkatkan ketidakpastian ekonomi global

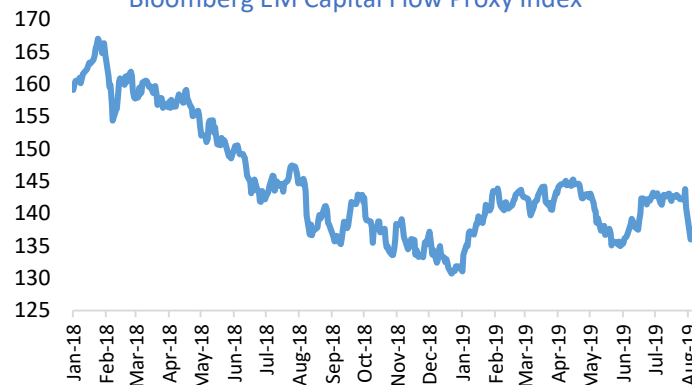
Terjadi kecenderungan penurunan aliran modal ke negara berkembang

Ketidakpastian global yang tinggi mendorong kenaikan permintaan akan safe haven asset a.l emas

Global Economic Uncertainty Index, Move Index, & VIX Index



Bloomberg EM Capital Flow Proxy Index



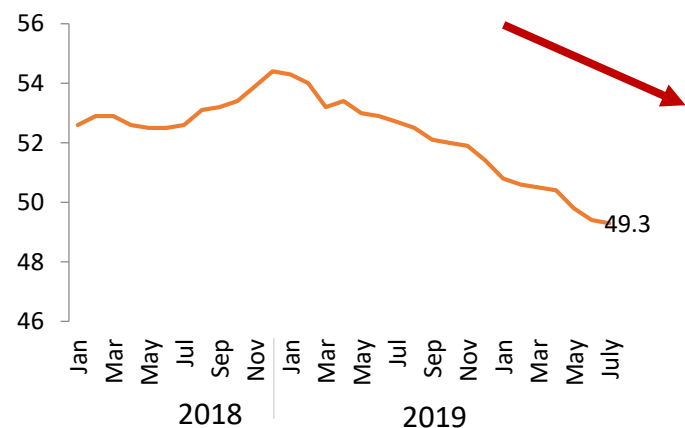
Harga Emas (US\$/troy oz)



Indeks manufaktur global mengalami penurunan dan berada di bawah angka 50

sejak pertengahan Juli hingga awal Agustus tekanan terhadap Rupiah meningkat

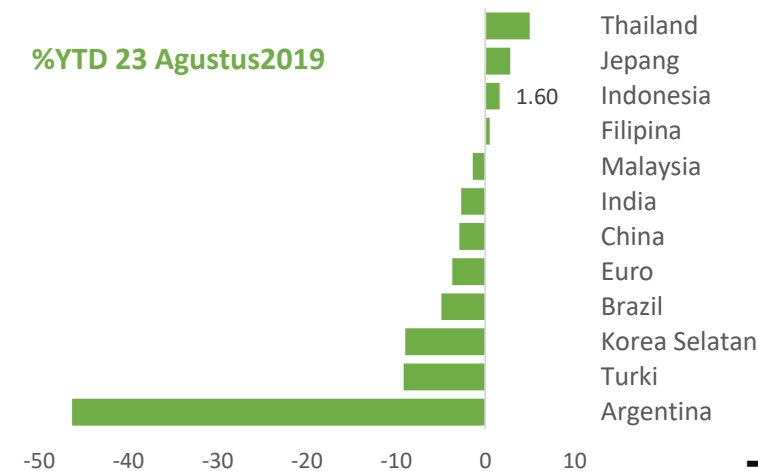
Per 23 Agustus 2019, nilai tukar rupiah terhadap dolar mengalami apresiasi sebesar 1.60% (ytd)



Perkembangan Nilai Tukar Rupiah harian (JISDOR)



%YTD 23 Agustus 2019

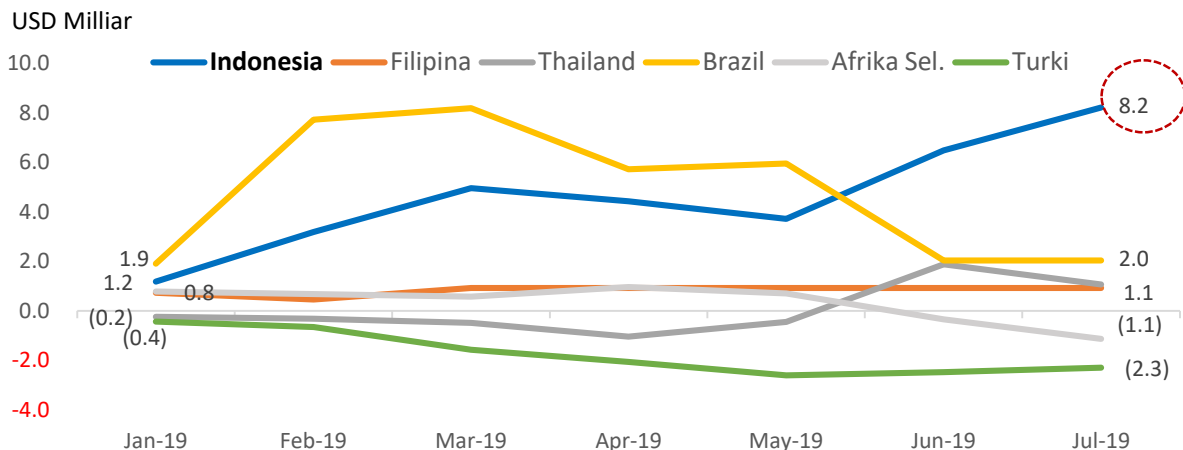




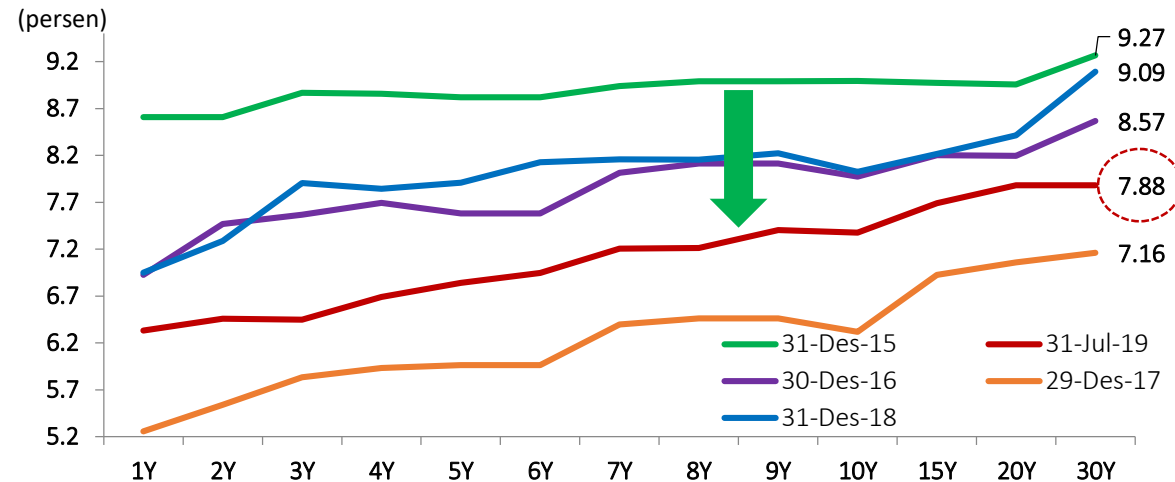
Perekonomian domestik sampai dengan Juli 2019 menunjukkan kinerja positif di tengah tekanan perekonomian global



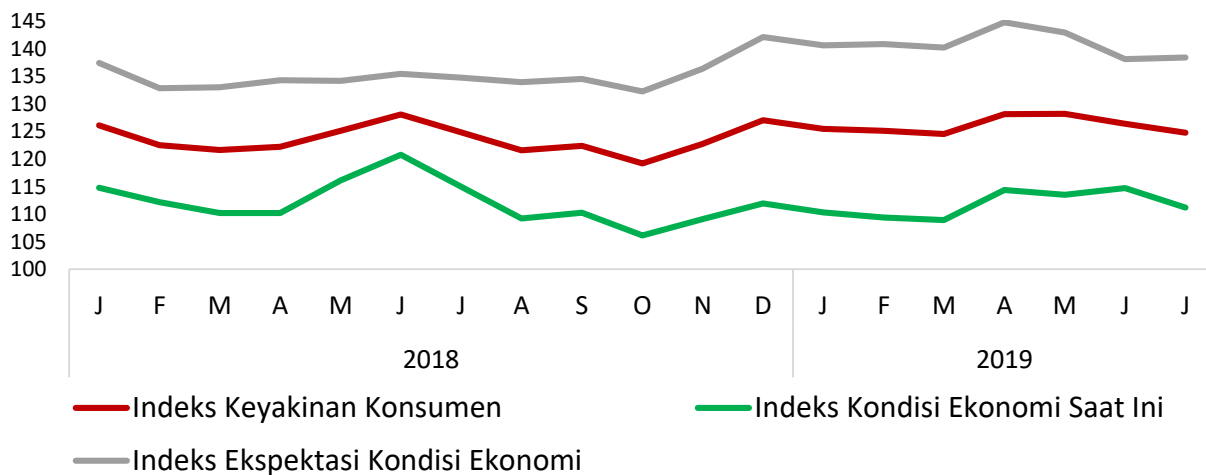
Capital inflow (Bond) ke Indonesia relatif lebih tinggi dibandingkan Peer Country



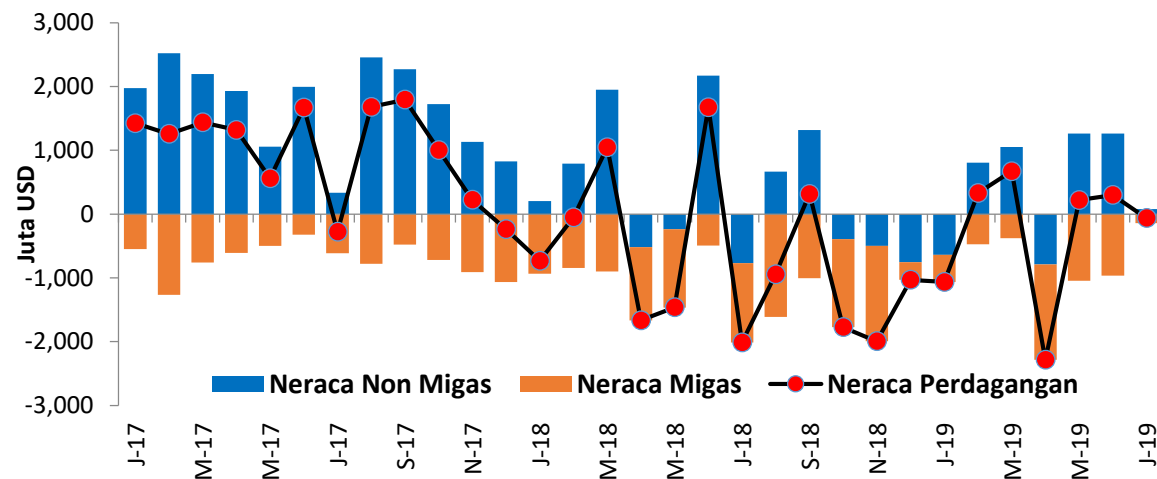
Yield SBN mengalami tren penurunan



Indeks Keyakinan Konsumen Terhadap Kondisi Ekonomi Saat Ini dan Akan Datang tetap positif



Pada Bulan Juli 2019 terjadi defisit neraca perdagangan sebesar USD63,5 juta, Secara kumulatif (Jan-Juli '19) masih tercatat defisit USD 1,90 Miliar





Perekonomian Indonesia tahun 2020 diproyeksikan tetap dapat tumbuh secara moderat di tengah tekanan global



Uraian	2015	2016	2017	2018	Outlook 2019	RAPBN 2020
Konsumsi RT dan LNPRT	4,8	5,0	5,0	5,1	5,1	4,9
Konsumsi Pemerintah	5,3	-0,1	2,1	4,8	4,9	4,3
PMTB	5,0	4,5	6,2	6,7	5,7	6,0
Ekspor	-2,1	-1,7	8,9	6,5	0,9	3,7
Impor	-6,2	-2,4	8,1	12,0	0,6	3,2
Pertumbuhan Ekonomi	4,9	5,0	5,1	5,2	5,2	5,3

Perkiraan Lembaga Internasional (%)

	2019	2020
IMF (Jul 19)	5,2	5,2
World Bank (Jun 19)	5,1	5,2
ADB (Jul 19)	5,2	5,3
Consensus Forecast (Mei 19)	5,0	5,1

Pertumbuhan ekonomi 2020 diproyeksi akan ditopang oleh kinerja konsumsi rumah tangga, PMTB, dan perbaikan ekspor

- **Konsumsi rumah tangga diperkirakan tetap tumbuh stabil**, sementara pengeluaran konsumsi LNPRT diperkirakan lebih rendah dibanding tahun 2019 ketika tahun Pemilu.
- **Investasi (PMTB) diperkirakan membaik** sejalan dengan perbaikan iklim investasi dan pendalaman sektor keuangan → Peta geopolitik, kebijakan perdagangan global, dan arus likuiditas juga menjadi faktor yang mempengaruhi investasi ke dalam negeri
- **Ekspor berpotensi membaik** namun terbatas, diantaranya didorong ekspor pariwisata dan produk manufaktur dan meningkatnya daya saing produk nasional. Sementara **Impor masih berpotensi meningkat** sejalan dengan prospek pertumbuhan ekonomi domestik yang membaik

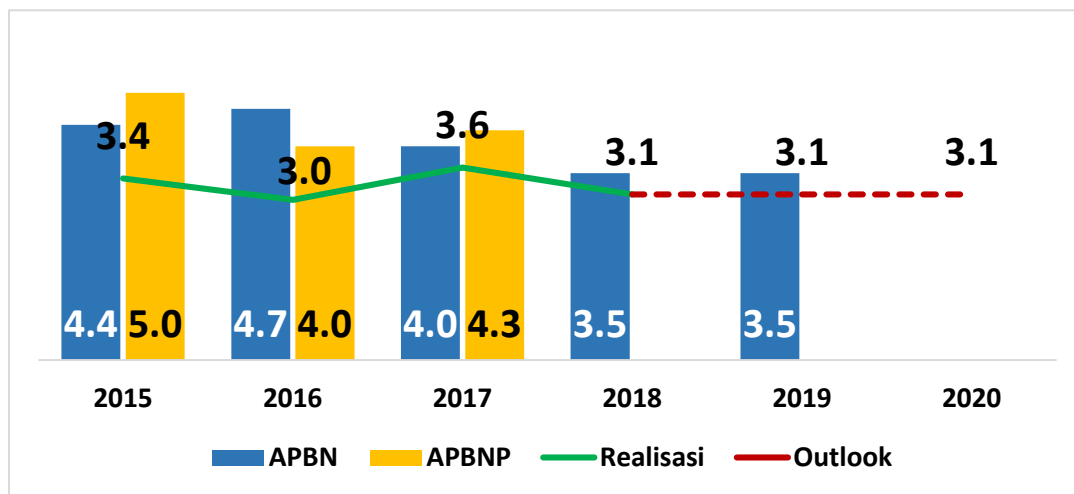
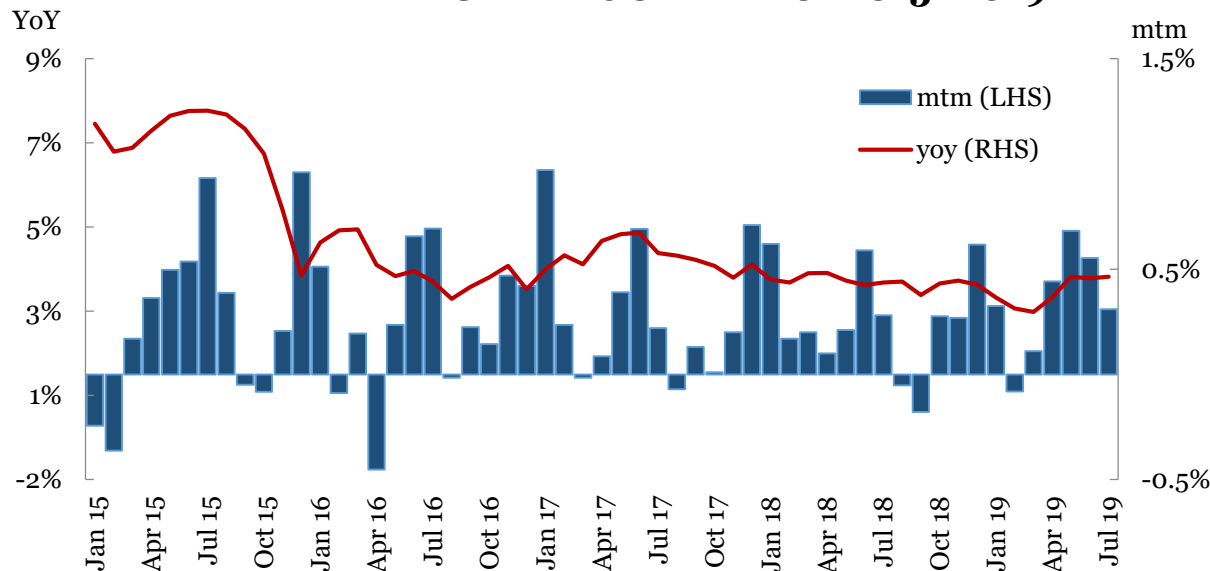


LAJU INFLASI TAHUN 2020 DIPERKIRAKAN MENCAPAI 3,1 PERSEN

Stabilitas harga akan dijaga stabil pada level yang rendah



PERKEMBANGAN LAJU INFLASI 2015- 2019



Pengendalian inflasi di tahun 2020 melalui :

- Menjaga **keterjangkauan harga** → didukung kebijakan subsidi, bantuan sosial, serta perlindungan sosial terutama untuk masyarakat miskin
- Menjaga **ketersediaan pasokan** → peningkatan produktivitas pertanian dan perbaikan tata niaga pangan untuk memenuhi kebutuhan antarwaktu
- Menjamin **kelancaran distribusi** → penyediaan infrastruktur dan koordinasi pemantauan distribusi yang juga melibatkan penegak hukum
- Melakukan komunikasi yang efektif untuk **menjaga ekspektasi inflasi** masyarakat
- Peningkatan **koordinasi dan sinergi** kebijakan yang dilaksanakan di tingkat Pusat dan Daerah bersama Bank Indonesia melalui kerangka Tim Pengendalian Inflasi Nasional (TPIN)

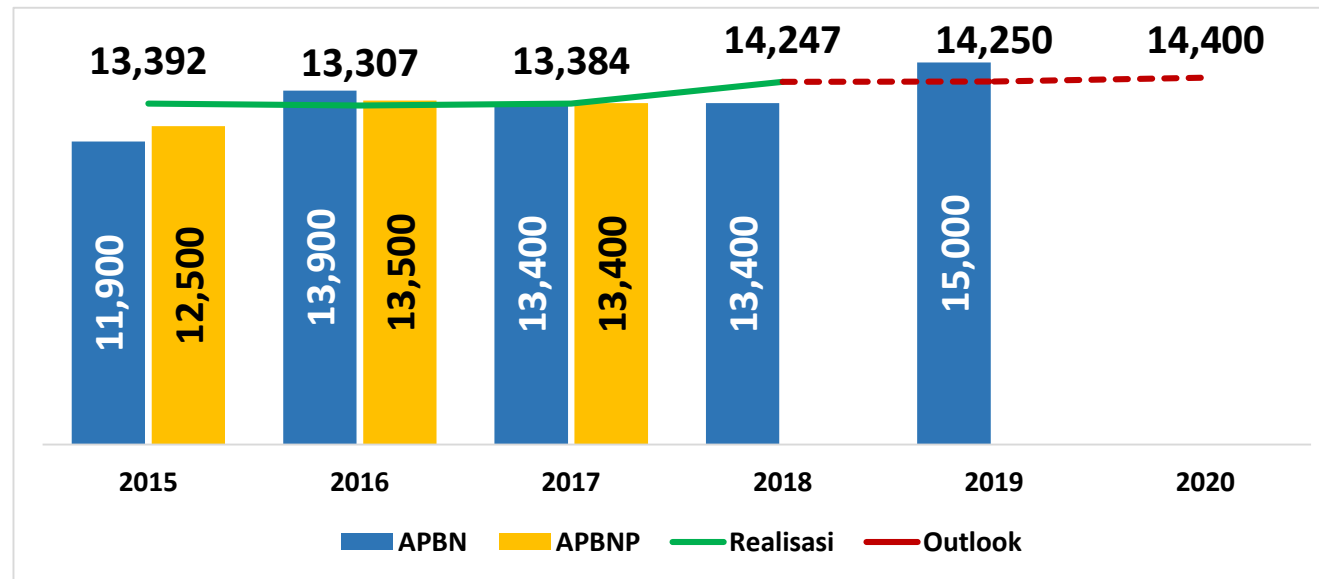
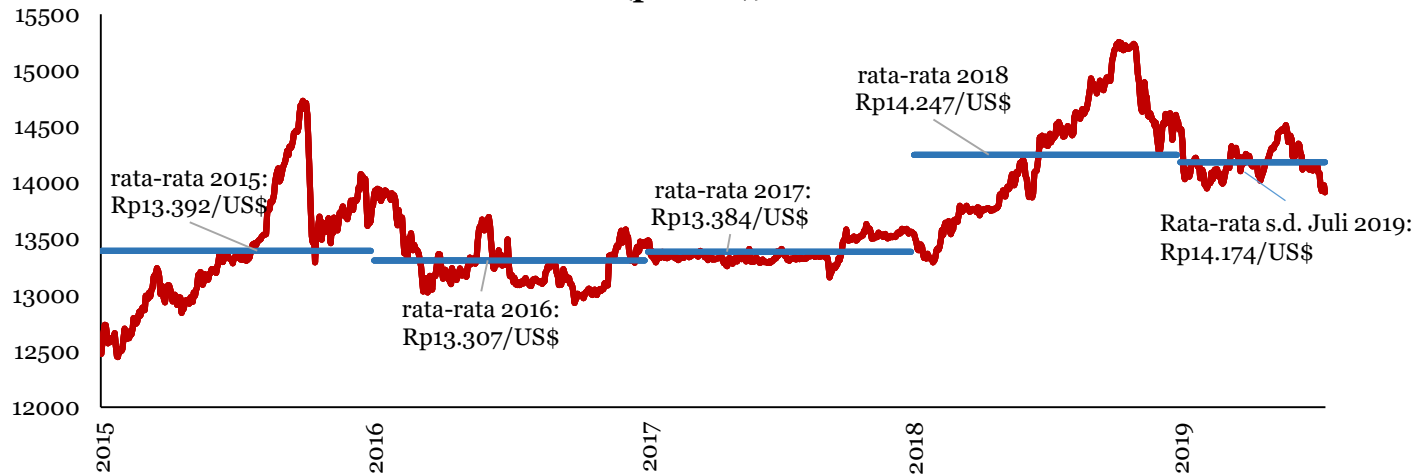


NILAI TUKAR RUPIAH TAHUN 2020 DIPERKIRAKAN BERADA PADA KISARAN Rp14.400/US\$



Seiring dengan masih terdapat risiko volatilitas terutama yang berasal dari sisi eksternal

PERKEMBANGAN RATA-RATA NILAI TUKAR TAHUN 2015-2019
(per US\$)



Pergerakan nilai tukar rupiah pada tahun 2020 antara lain dipengaruhi oleh faktor :

- **Risiko ketidakpastian global** → berlanjutnya perang dagang dan proteksionisme serta Perubahan arah kebijakan moneter Amerika Serikat
- **Harga komoditas yang relatif stagnan** yang dapat berpengaruh terhadap kinerja ekspor nasional dan neraca transaksi berjalan
- **Perbaikan fundamental ekonomi Indonesia** yang diikuti aliran modal masuk dan peningkatan persepsi positif pasar terhadap perekonomian domestik
- **Kebijakan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar Rupiah** a.l melalui fasilitas *second line defense* dan *local currency settlement framework*

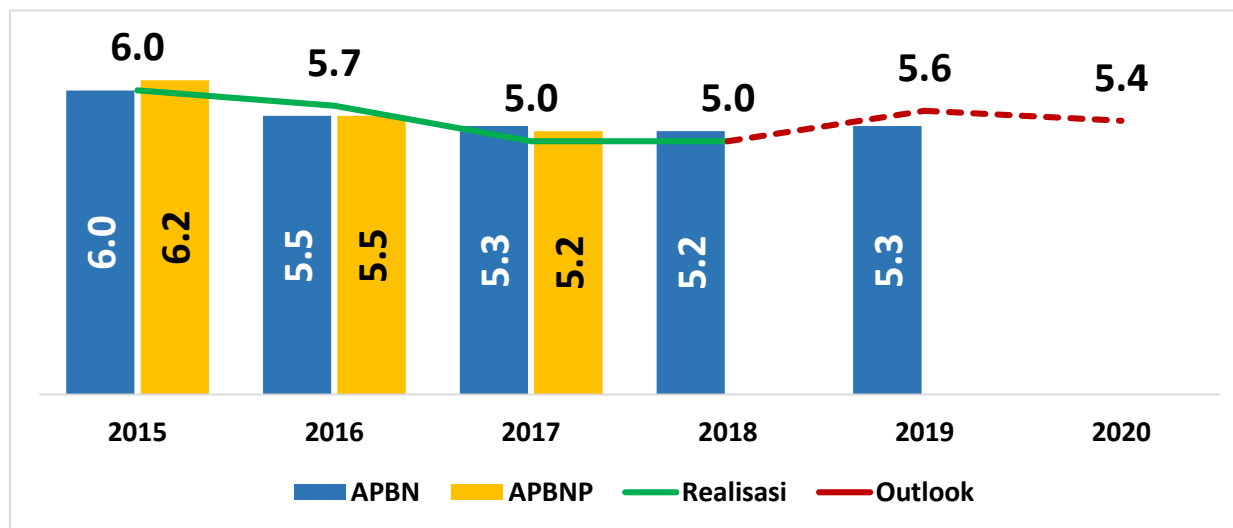
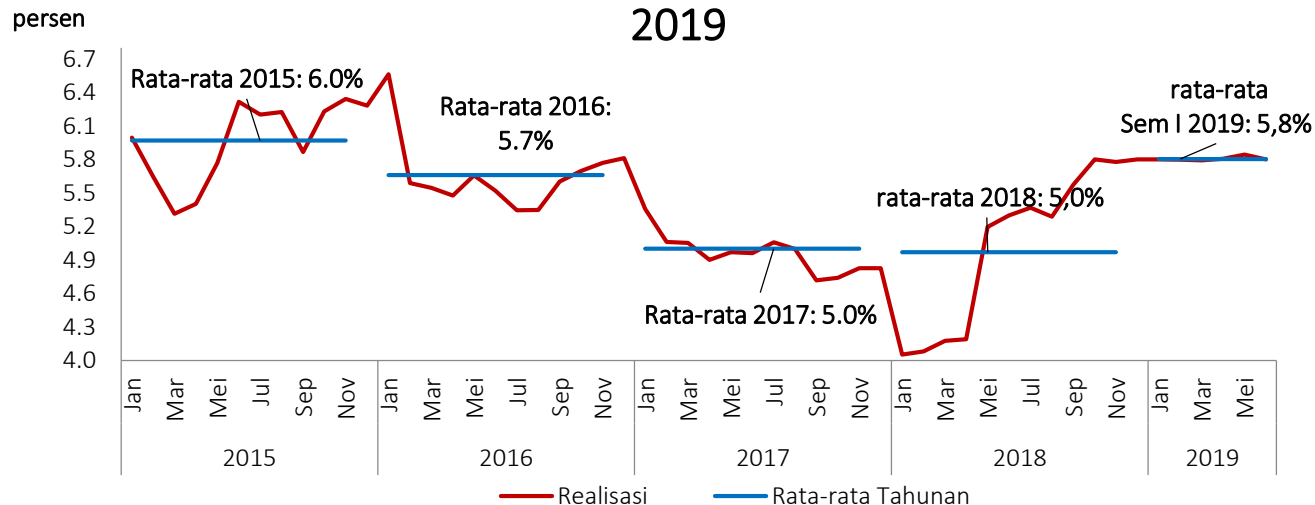


TINGKAT SUKU BUNGA SPN 3 BULAN TAHUN 2020 DIPERKIRAKAN 5,4%



Menurun dibandingkan tahun sebelumnya seiring dengan menurunnya risiko pasar finansial global

PERKEMBANGAN SUKU BUNGA SPN 3-BULAN, 2015–2019



Suku bunga SPN 3 bulan di tahun 2020 didukung beberapa faktor a.l :

- **Perspektif positif pelaku pasar** terhadap kondisi kenaikan peringkat utang dan perbaikan daya saing Indonesia
- **Terjaganya stabilitas ekonomi makro Indonesia** dan kondisi fiskal yang sehat serta prospek pertumbuhan ekonomi domestic
- Kebijakan **pendalaman sektor keuangan** dan Likuiditas dalam negeri diperkirakan lebih longgar
- Arus **likuiditas global** menuju *Emerging Market*

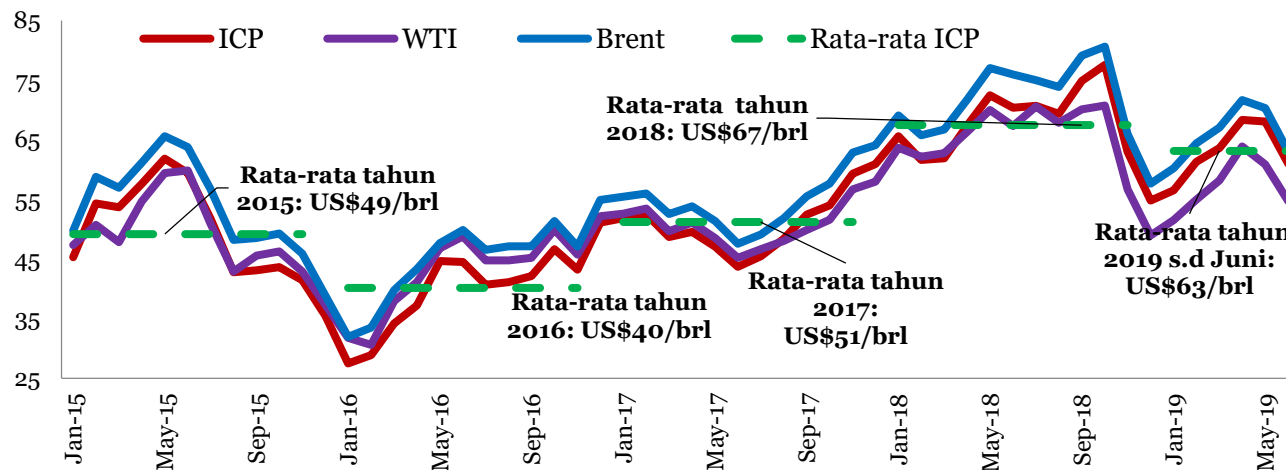


HARGA MINYAK INDONESIA (ICP) TAHUN 2020 DIPERKIRAKAN US\$65/BAREL

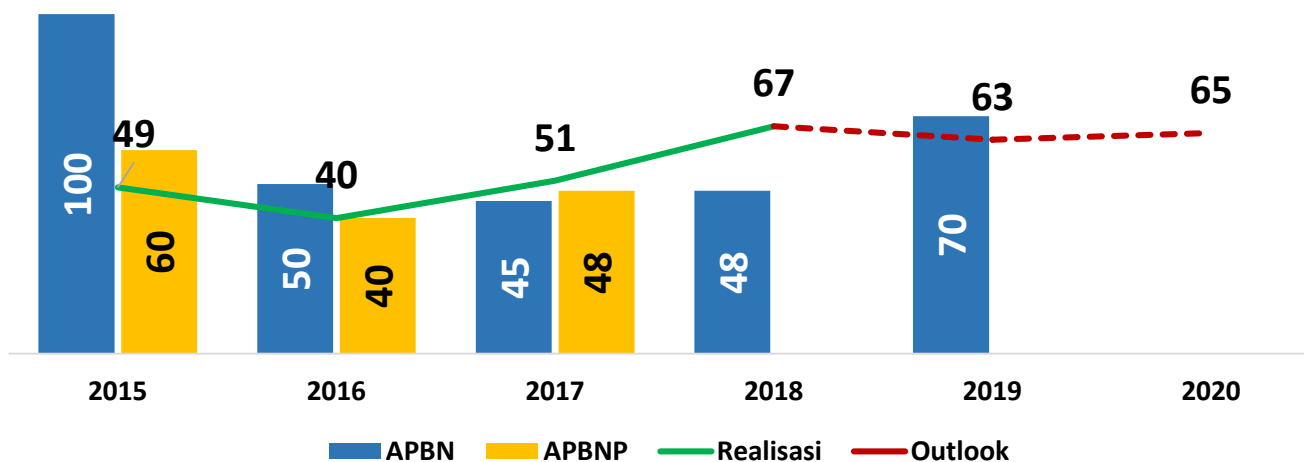
Memperhatikan faktor permintaan-penawaran pada pasar global dan risiko geopolitik



PERKEMBANGAN HARGA MINYAK, 2015-2019



Sumber: Kementerian ESDM



Perkiraan harga minyak mentah Indonesia didasari beberapa faktor antara lain:

- **Pertumbuhan permintaan** minyak mentah global di tahun 2020 yang lebih tinggi dibanding 2019.
- **Penurunan produksi OPEC** disebabkan penurunan produksi Venezuela dan sanksi AS terhadap Iran
- Mulai diterapkannya **pembatasan** tingkat sulfur pada kapal-kapal tanker oleh Organisasi Maritim Internasional (*International Maritime Organizations/IMO*) sejak 1 Januari 2020
- Ketidakpastian **keberlanjutan pemangkasan** produksi minyak mentah oleh OPEC+ yang akan berakhir pada Maret 2020
- Risiko masih berlanjutnya perang dagang AS dan Tiongkok

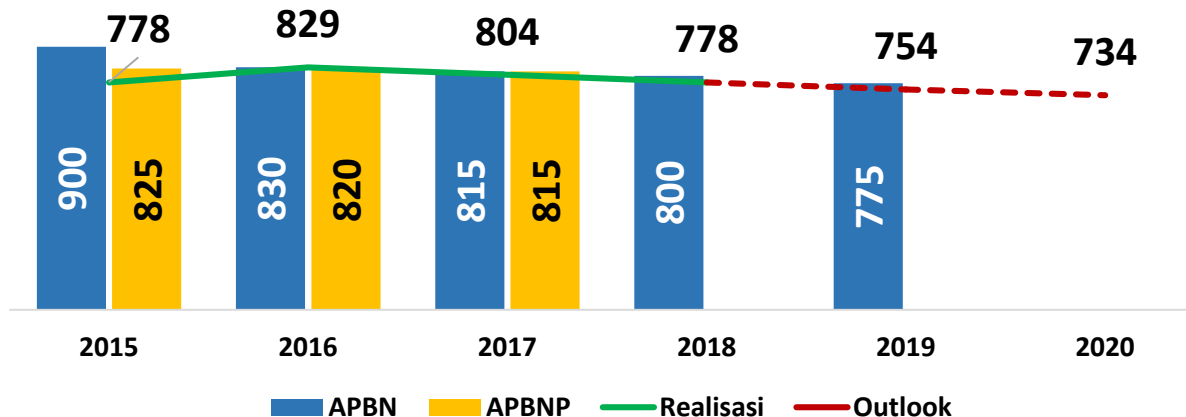


LIFTING MIGAS TAHUN 2020 DIPERKIRAKAN SEBESAR 1.925 RBPH

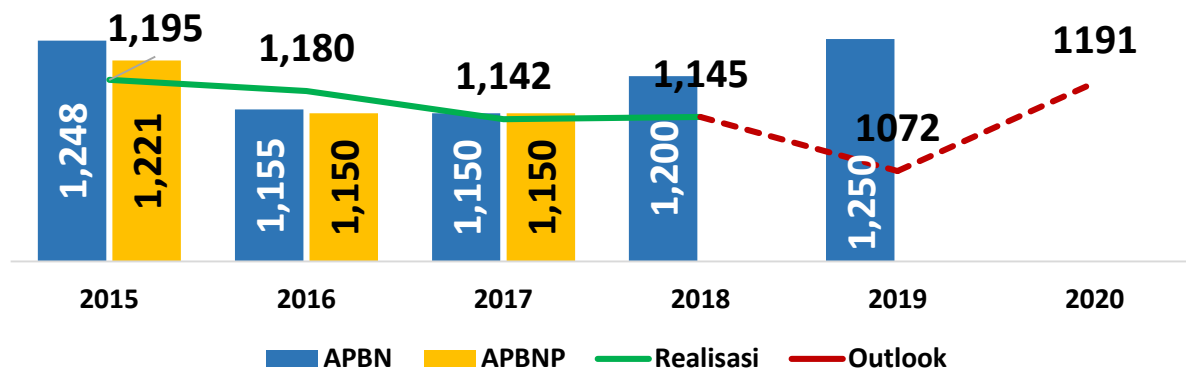
terdiri atas lifting minyak sebesar 734 rbph dan lifting gas bumi sebesar 1.191 rbph



PERKEMBANGAN LIFTING MINYAK BUMI
2015-2020 (rbph)



PERKEMBANGAN LIFTING GAS
2015-2020 (rbph)



Upaya Pemerintah untuk menjaga target lifting migas tahun 2020 antara lain:

- Mendorong aktivitas eksplorasi berkelanjutan
→ perbaikan institusi, perbaikan iklim usaha dan penyederhanaan proses perizinan dan birokrasi terkait rencana pengembangan (*plan of development*)
- Menjaga tingkat produksi lapangan migas *existing* → perawatan sumur maupun kerja ulang; melakukan utilisasi teknologi produksi, (Enhanced Oil Recovery (EOR) dan survey seismic).
- Melaksanakan *exploration roadshow* ke berbagai negara guna menjaring potensi investor serta mendorong peran Indonesia Oil and Gas Institute (IOGI)



Asumsi Dasar Ekonomi Makro RAPBN 2020



Pertumbuhan
Ekonomi (%)

Realisasi
2017

5,07

Realisasi
2018

5,17

Outlook
2019

5,2

RAPBN
2020

5,3



Inflasi
(% yoy)

3,6

3,1

3,1

3,1



Nilai Tukar
(Rp/USD)

13.384

14.247

14.250

14.400



Suku Bunga
SPN (%)

5,0

5,0

5,6

5,4



Harga Minyak
(US\$/barrel)

51

67

63

65



Lifting Minyak
(ribu barrel/hari)

804

778

754

734



Lifting Gas
(ribu barrel/hari)

1.142

1.145

1.072

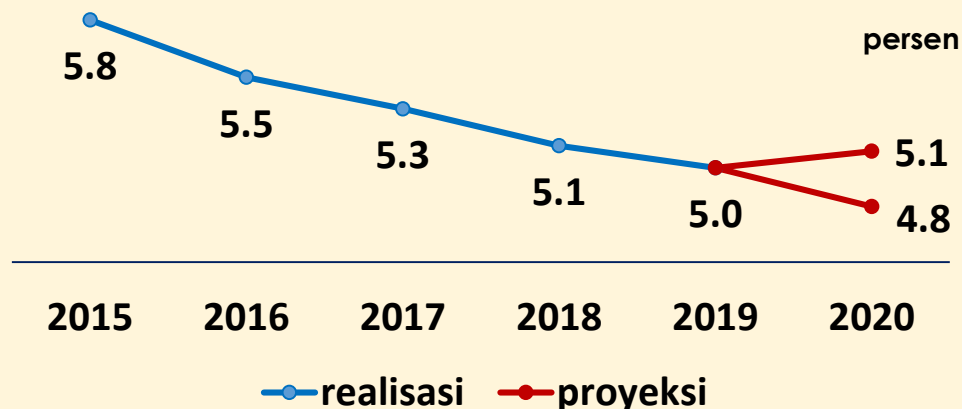
1.191



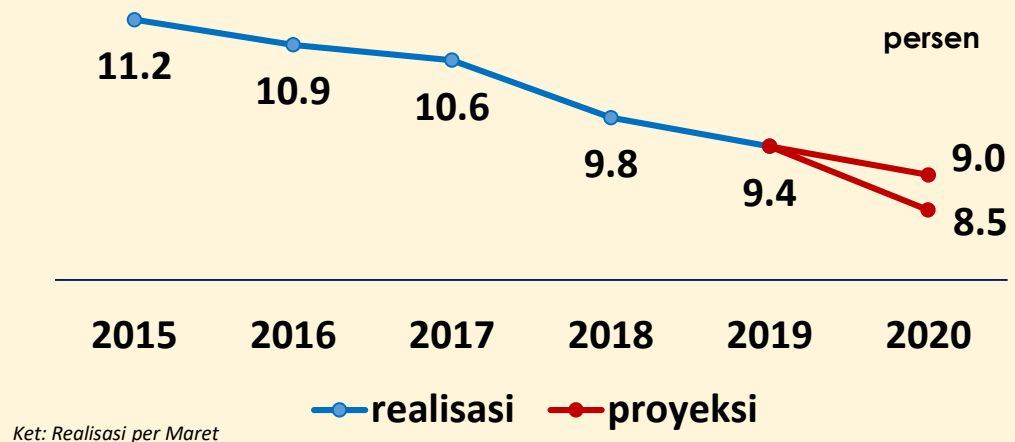
Peningkatan pertumbuhan ekonomi diikuti dengan perbaikan indikator kesejahteraan



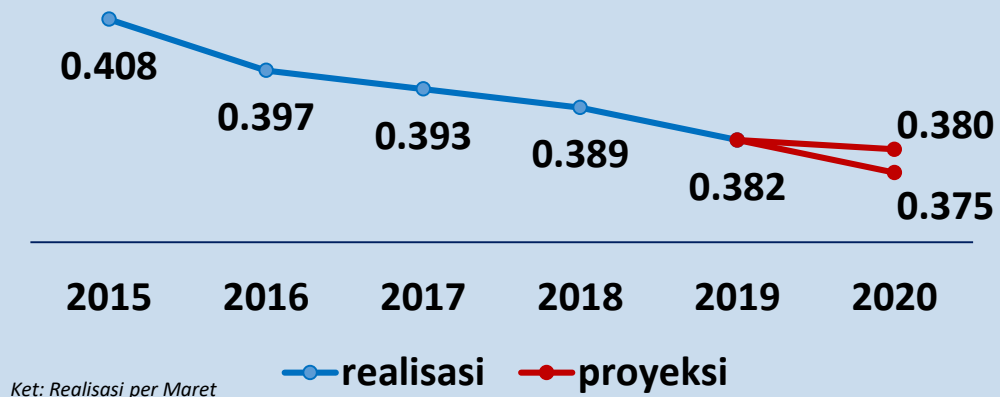
Tingkat pengangguran: diturunkan melalui pengembangan SDM dan memacu pertumbuhan ekonomi



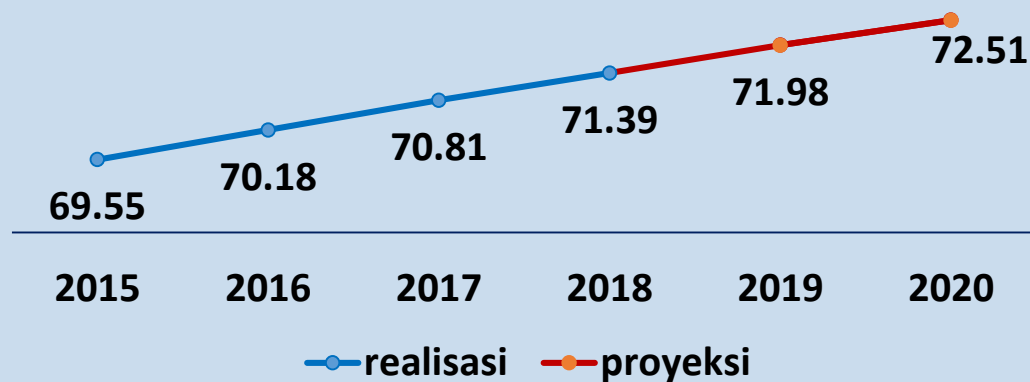
Tingkat Kemiskinan: diturunkan melalui program bantuan sosial yang semakin efektif



Indeks Gini: Pemerataan dan keadilan ekonomi terus diupayakan



IPM : ditingkatkan melalui program penguatan kualitas SDM





2 Pokok-Pokok Kebijakan RAPBN Tahun 2020



Postur RAPBN 2020

(Rp triliun)



I PENDAPATAN NEGARA

PENERIMAAN PERPAJAKAN

PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK

PENERIMAAN HIBAH

II BELANJA NEGARA

BELANJA PEMERINTAH PUSAT

TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA

III KESEIMBANGAN PRIMER

IV DEFISIT ANGGARAN

% PDB

V PEMBIAYAAN ANGGARAN

**Realisasi
2017**

**Realisasi
2018**

**Outlook
2019**

**RAPBN
2020**

1.666,4

1.943,7

2.030,8

2.221,5

1.343,5

1.518,8

1.643,1

1.861,8

311,2

409,3

386,3

359,3

11,6

15,6

1,3

0,5

2.007,4

2.213,1

2.341,6

2.528,8

1.265,4

1.455,3

1.527,2

1.670,0

742,0

757,8

814,4

858,8

(124,4)

(11,5)

(34,7)

(12,0)

(341,0)

(269,4)

(310,8)

(307,2)

(2,51)

(1,82)

(1,93)

(1,76)

366,6

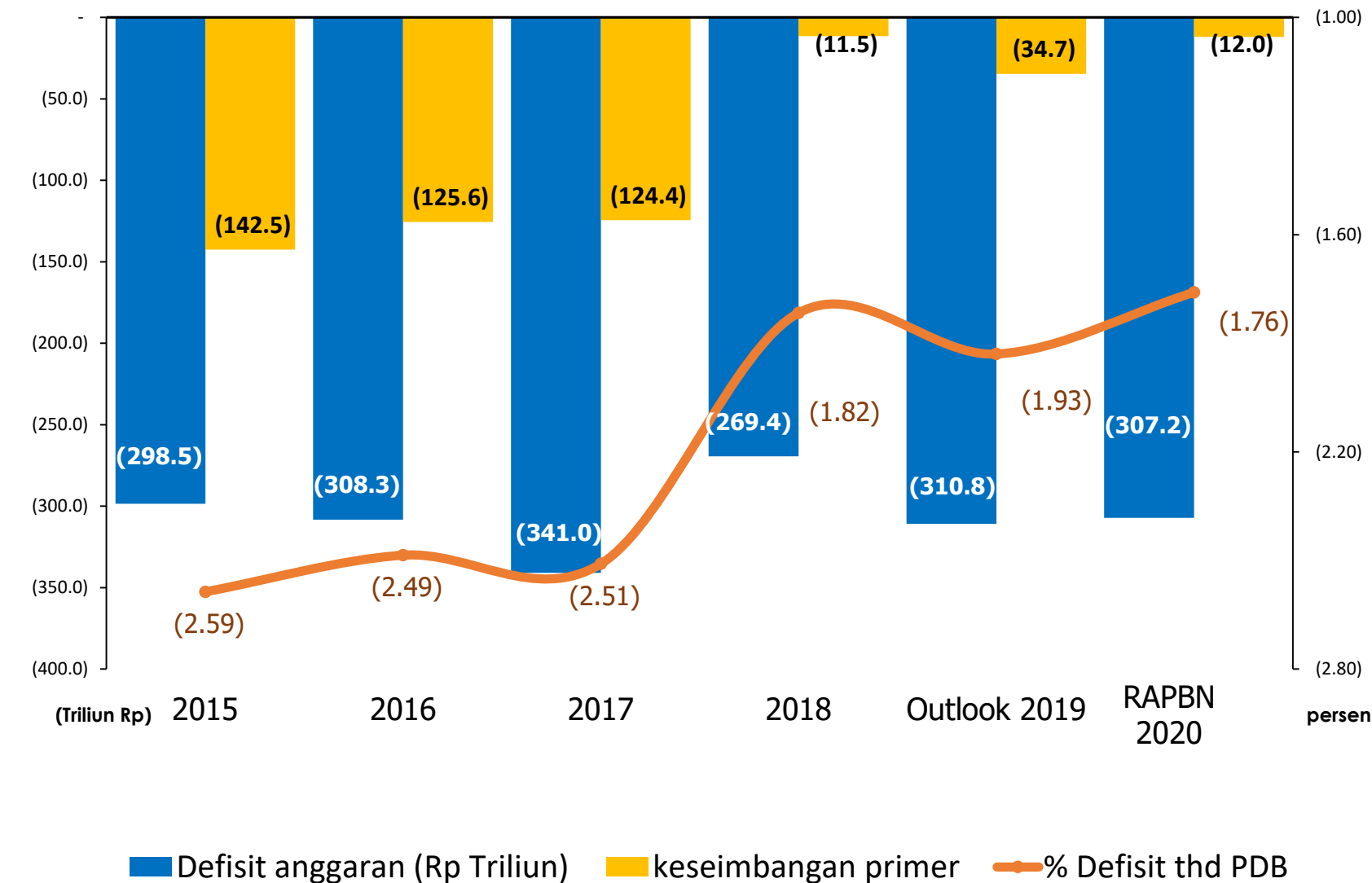
305,7

310,8

307,2



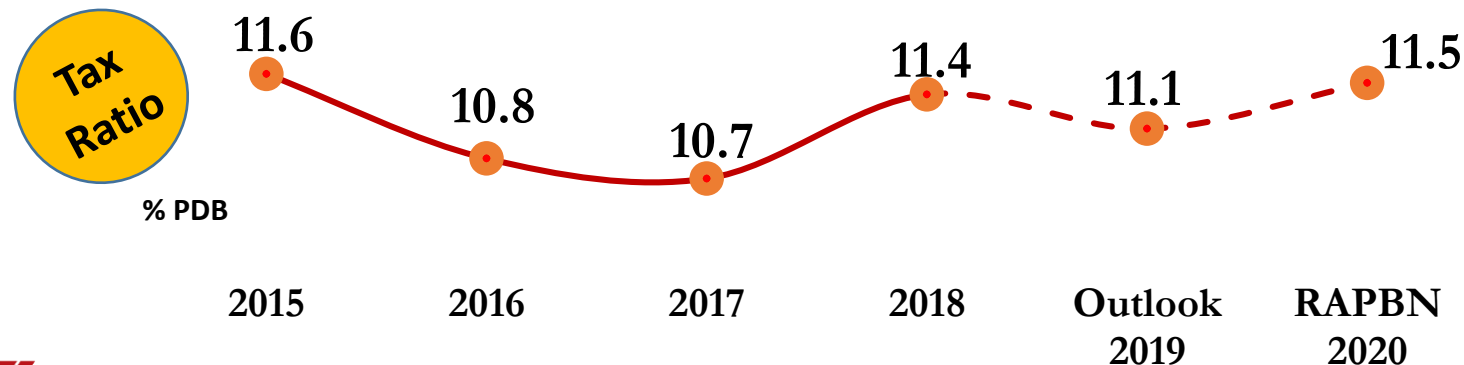
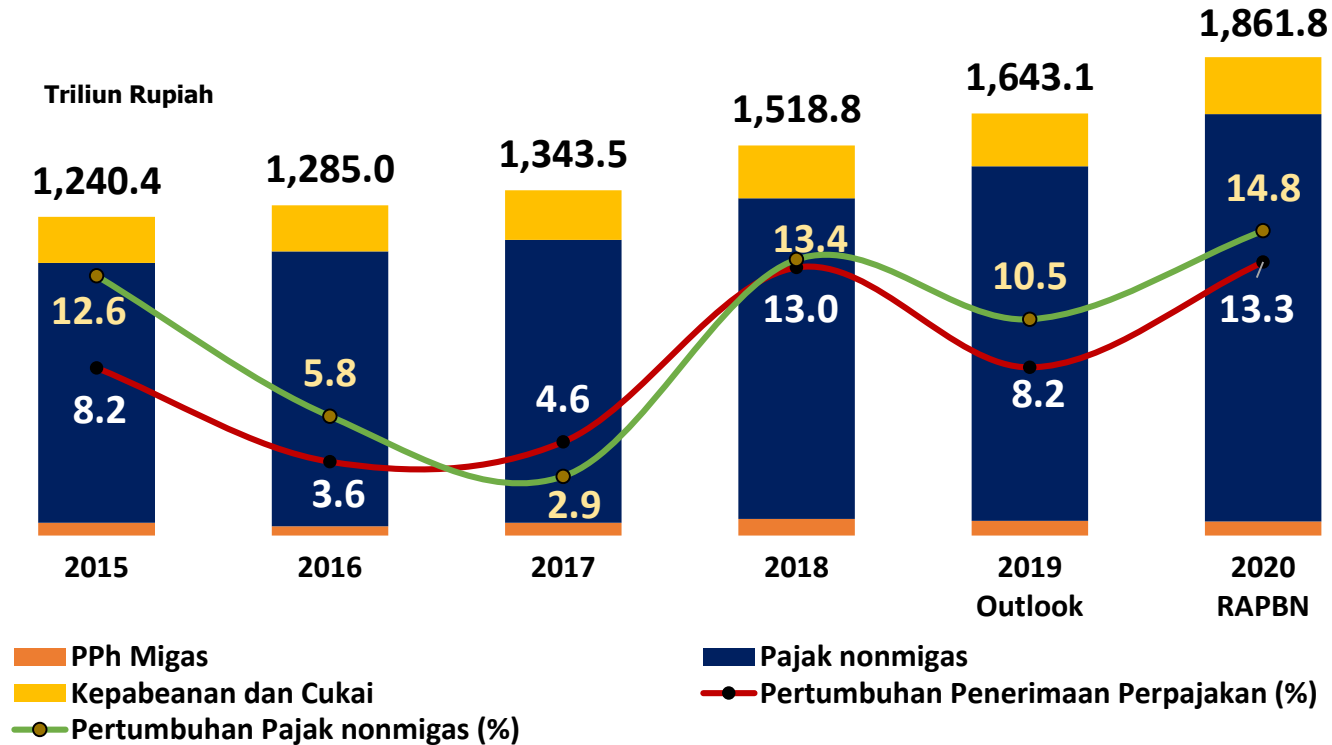
Defisit Anggaran Tahun 2020 dijaga 1,76% PDB, diarahkan semakin sehat dan adaptif menghadapi risiko perekonomian



- **Rasio defisit thd PDB** tahun 2020 **terendah** dalam lima tahun terakhir
- Defisit Keseimbangan Primer **diturunkan bertahap** Ke arah positif
- **Penerimaan perpajakan untuk mendukung daya saing** dengan target yang lebih optimal dan realistis
- **Belanja Negara semakin fokus** pada program yang produktif
- **Pembiayaan anggaran semakin menurun** dan dimanfaatkan untuk mendukung peningkatan daya saing



Optimalisasi penerimaan negara disertai Reformasi di bidang perpajakan dalam rangka mendukung perekonomian dan dunia usaha

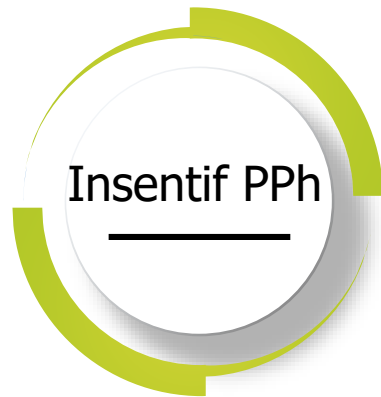


Kebijakan Perpajakan

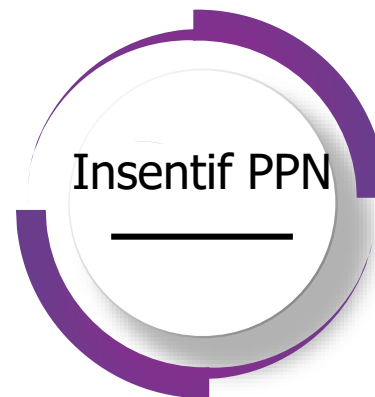
- Meningkatkan kepatuhan wajib pajak
- Perbaiki kualitas pelayanan, penyuluhan, dan pengawasan melalui penguatan sistem IT dan administrasi perpajakan
- Menyetarakan *level playing field*
- Perbaiki proses bisnis khususnya dalam hal restitusi PPN
- Implementasi Keterbukaan Informasi Perpajakan (AEoI)
- Ekstensifikasi barang kena cukai
- Penyesuaian tarif cukai hasil tembakau



Penerimaan perpajakan juga menjadi instrumen untuk mendukung investasi dan daya saing melalui pemberian insentif fiskal



- ❑ *super deduction* utk kegiatan vokasi & litbang;
- ❑ *mini tax holiday* utk investasi sampai dengan Rp500 miliar;
- ❑ *investment allowance* utk industri padat karya;
- ❑ PPh DTP antara lain untuk sektor panas bumi, PPh SBN Valas, dan Penghapusan Piutang PDAM 2020.



- ❑ Insentif PPN bagi impor dan penyerahan barang strategis → mesin dan peralatan pabrik;
- ❑ PPN tidak dipungut atas impor dan penyerahan jasa dan alat angkut tertentu (a.l. kapal laut, pesawat udara dan kereta api).



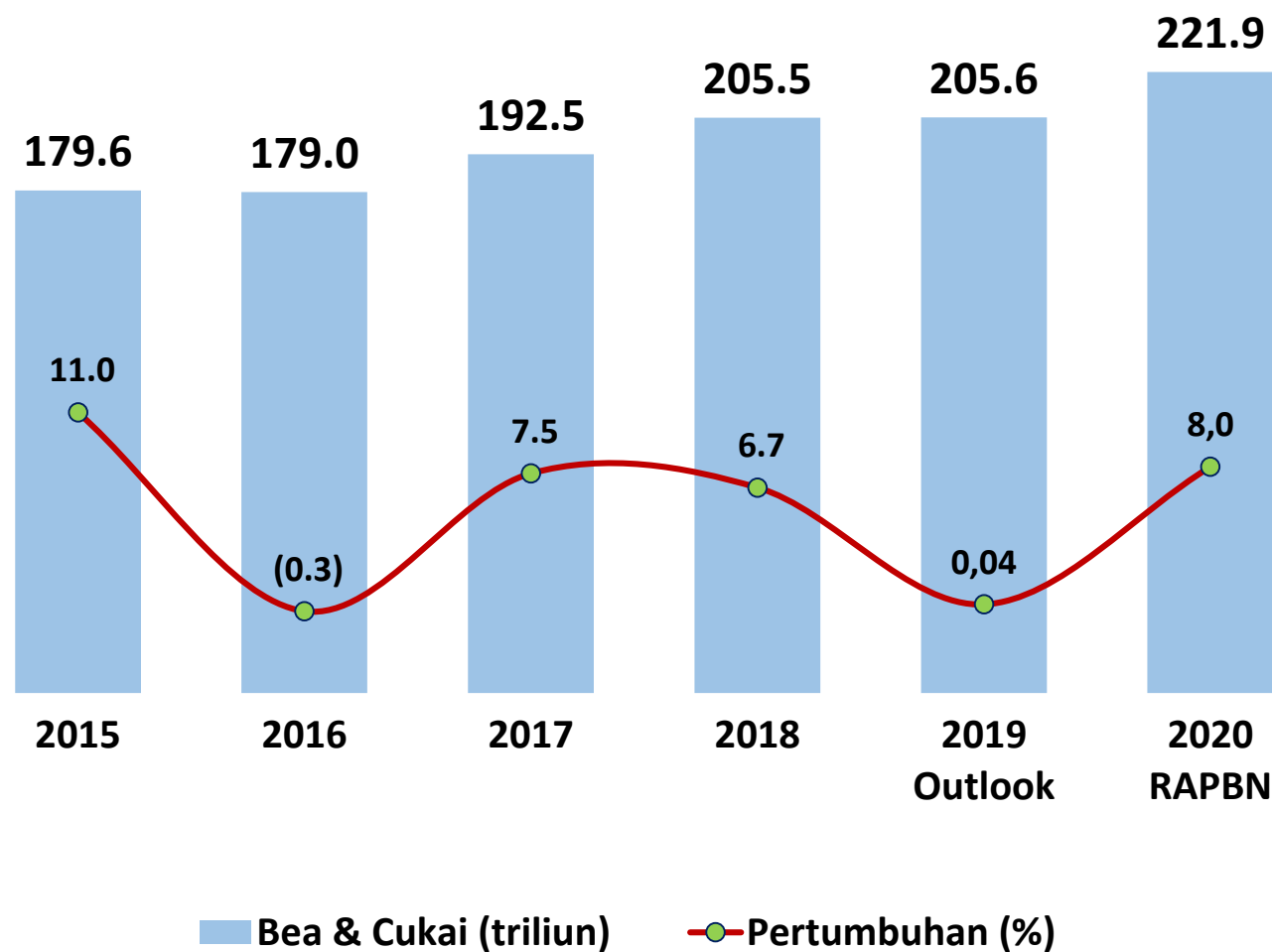
- ❑ Fasilitas kepabeanan a.l. kepada kawasan berikat, gudang berikat, kemudahan impor tujuan ekspor, dan kawasan ekonomi khusus;
- ❑ Bea Masuk ditanggung Pemerintah (BMDTP) untuk industri tertentu

Estimasi
Tax Expenditure
(Insentif perpajakan)

- Tahun 2016 : **Rp192,6 T atau 1,55% PDB**
- Tahun 2017 : **Rp196,8 T atau 1,45% PDB**
- Tahun 2018 : **Rp221,1 T atau 1,49% PDB**



Kebijakan kepabeanan dan cukai turut mendukung kemudahan bisnis, menurunkan *dwelling time*, dan mengurangi tingkat penyelundupan



Trade Facilitator

Percepatan layanan & kemudahan prosedural impor yg berkontribusi terhadap Penurunan Dwelling time



Industrial Assistance

Pemberian fasilitas fiskal dan prosedur kepabeanan kepada: 1371 kawasan berikat, 242 Gudang Berikat, 33 toko bebas bea, 8 eterport tujuan, 379 Kemudahan impor tujuan ekspor, 12 Kawasan ekonomi khusus



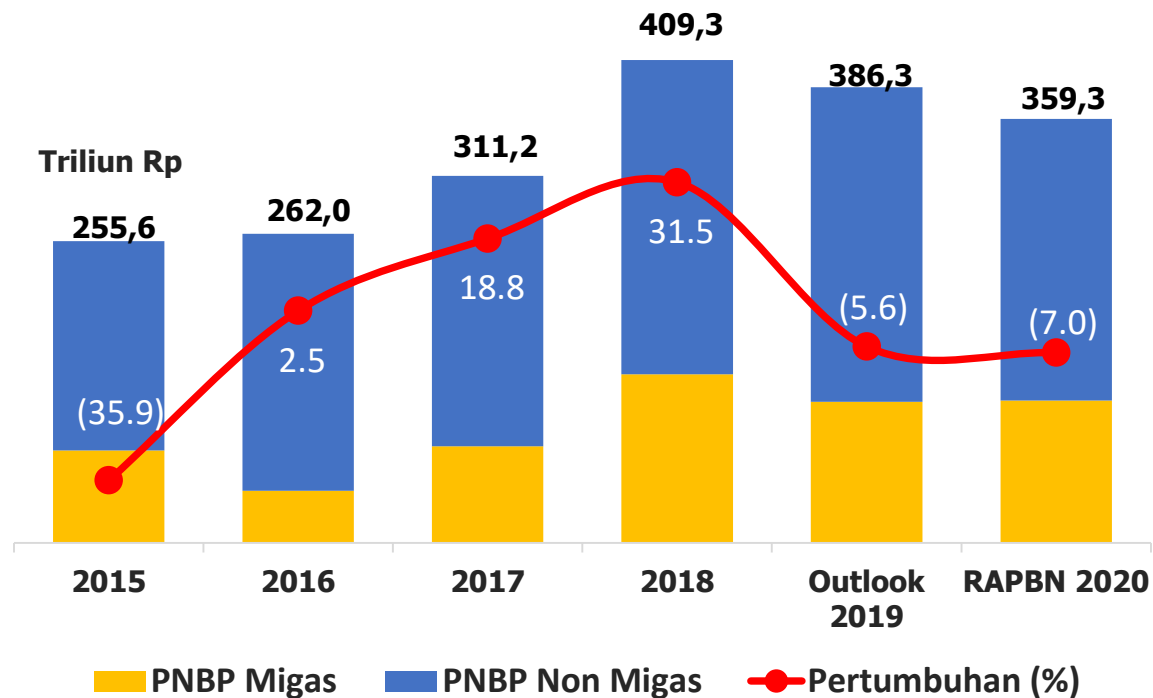
Community Protector

Melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang berbahaya. Hasil penindakan:

- Tahun 2018 sebesar Rp11,8 T
- Tahun 2017 sebesar Rp7,05 T
- Tahun 2016 sebesar Rp4,0 T



Peranan PNBP sektor Nonmigas terus diperkuat disertai peningkatan layanan kepada masyarakat



Pengelolaan dan Pemanfaatan SDA yang Optimal, Efektif dan Efisien

- Penyempurnaan regulasi dan kontrak.
- Efisiensi kegiatan.
- Peningkatan kepatuhan dan intensifikasi pengawasan.



Peningkatan Pelayanan dan Penyesuaian Tarif

- Mempertimbangkan daya beli dan pengembangan dunia usaha.
- Optimalisasi pengelolaan Barang Milik Negara (BMN).



Peningkatan Efisiensi BUMN dan Kinerja BLU

- Mempertimbangkan cashflow BUMN dan kemampuan keuangan BUMN.
- Pengembangan usaha dan penugasan Pemerintah.
- Pelayanan BLU yang lebih profesional.



Penyempurnaan Tata Kelola

- implementasi UU PNBP dan penyempurnaan regulasi pelaksanaan UU PNBP
- Perluasan penggunaan teknologi informasi dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pelayanan



Fokus Belanja Pemerintah Pusat Tahun 2020 untuk mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintah → efisien dan efektif



Anggaran Pendidikan
Rp505,8 T

Anggaran Kesehatan
Rp132,2 T

SDM yang berkualitas 01

- Peningkatan **produktivitas/daya saing SDM**
- Bidang Pendidikan → perluasan **akses pendidikan, peningkatan skill, entrepreneurship, penguasaan ICT, dukungan kegiatan penelitian**
- Bidang Kesehatan → percepatan **pengurangan stunting**, penguatan promotif preventif, *melanjutkan* program **jaminan kesehatan nasional**

Penguatan Program Perlindungan Sosial 02

- Mengakselerasi pengentasan kemiskinan
- Peningkatan **akurasi data dan perbaikan mekanisme penyaluran**,
- **Sinergi/sinkronisasi** antar program
- **Subsidi yang tepat sasaran dan efektif**

Anggaran Perlindungan Sosial
Rp385,3 T

03 Akselerasi Pembangunan Infrastruktur

- Meningkatkan daya saing investasi dan ekspor
- Mendukung **transformasi industrialisasi** (konektivitas, pangan, energi, dan air) dan **antisipasi masalah sosial perkotaan** (air bersih, sanitasi, pengelolaan sampah, & transportasi massal)
- Mendorong K/L menggunakan skema **pembiayaan kreatif** (KPBU: VGF atau AP)

Anggaran Infrastruktur
Rp419,2 T

04 Birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi

- Mendorong **efektivitas birokrasi** → produktivitas, integritas & pelayanan publik
- **Menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan** (antisipasi reformasi pensiun)
- **Birokrasi yang berbasis kemajuan ICT**

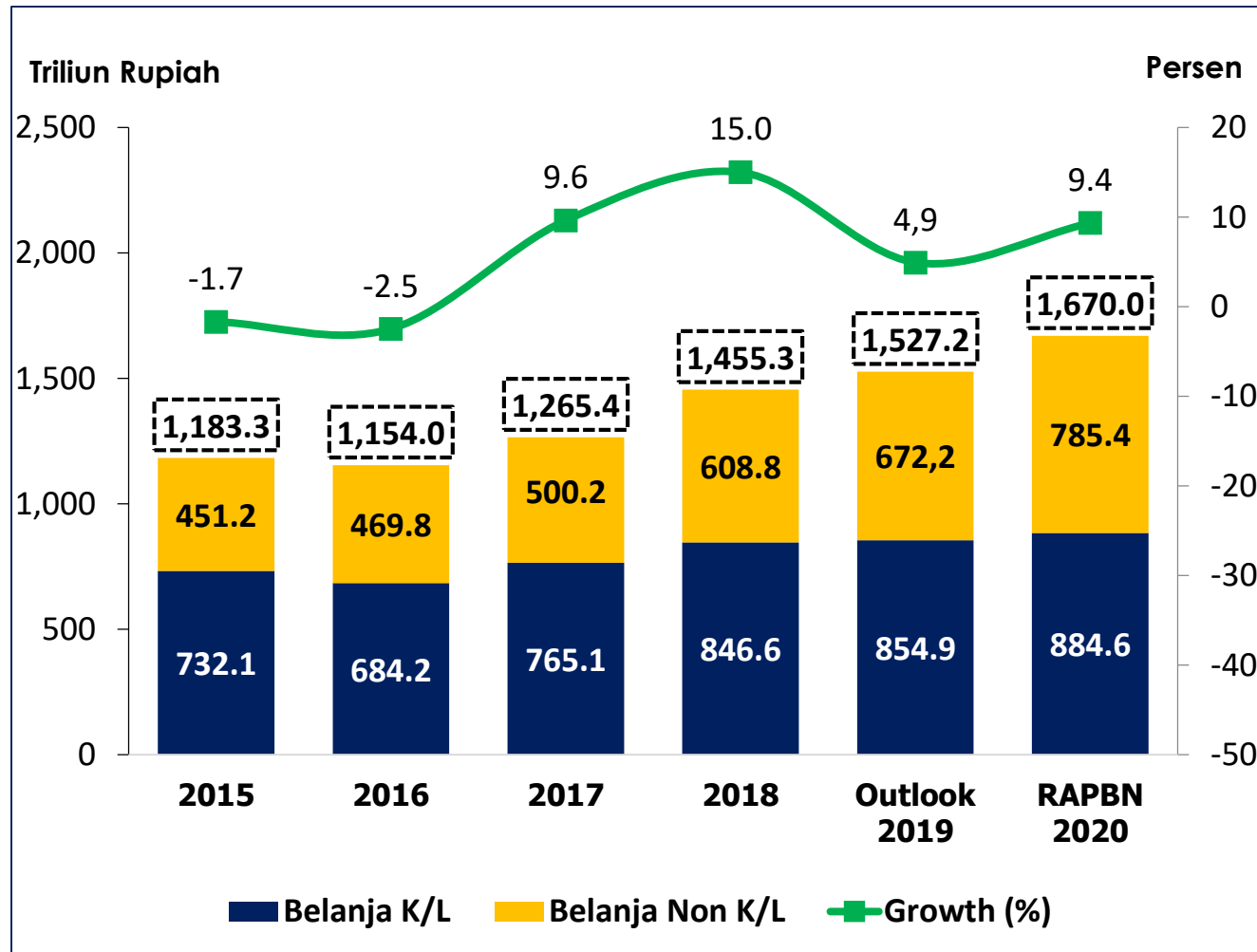
Anggaran Reformasi Birokrasi
Rp261,3 T

05 Antisipasi ketidakpastian

- **Stabilitas** ekonomi, keamanan dan politik
- **Mitigasi risiko bencana**, pelestarian lingkungan, dan pengembangan EBT
- Penguatan **fiscal buffer** untuk **fleksibilitas dan sustainabilitas**



Belanja Pemerintah Pusat diarahkan untuk mendukung peningkatan kualitas SDM dan beberapa kegiatan strategis



Pemenuhan Visi Misi Presiden dan Beberapa Kegiatan Strategis

- Peningkatan kualitas SDM (KIP Kuliah, Kartu Sembako, Kartu Prakerja)
- Pemerataan pembangunan antar wilayah
- Perbaikan kualitas kesehatan
- Percepatan pengembangan 4 destinasi wisata super prioritas
- Dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan dunia usaha.

Efisiensi & Efektivitas

Spending Better → penajaman belanja barang, penguatan belanja modal, efektivitas bansos

Sinergi

Koordinasi program-program strategis lintas K/L (vokasi, penguatan destinasi wisata, penelitian)



Belanja K/L diarahkan pada bidang pembangunan SDM (pendidikan dan kesehatan), infrastruktur, perlindungan sosial, dan hankam



(triliun rupiah)		● Real 2018	● Outlook 2019	● 2020			● Real 2018	● Outlook 2019	● 2020
	Kemenhan	106,7	109,6	127,4		Kemenkes	57,3	57,8	57,4
	Kemen PUPR	102,5	111,8	120,2		Kemenhub	45,1	41,4	42,7
	Polri	98,1	94,3	90,3		Kemenristekdikti	43,2	40,4	42,2
	Kemenag	59,4	60,2	65,1		Kemenkeu (tidak termasuk BLU kelapa sawit)	33,5	36,9	37,2
	Kemensos	41,2	57,2	62,8		Kemendikbud	39,4	35,1	35,7

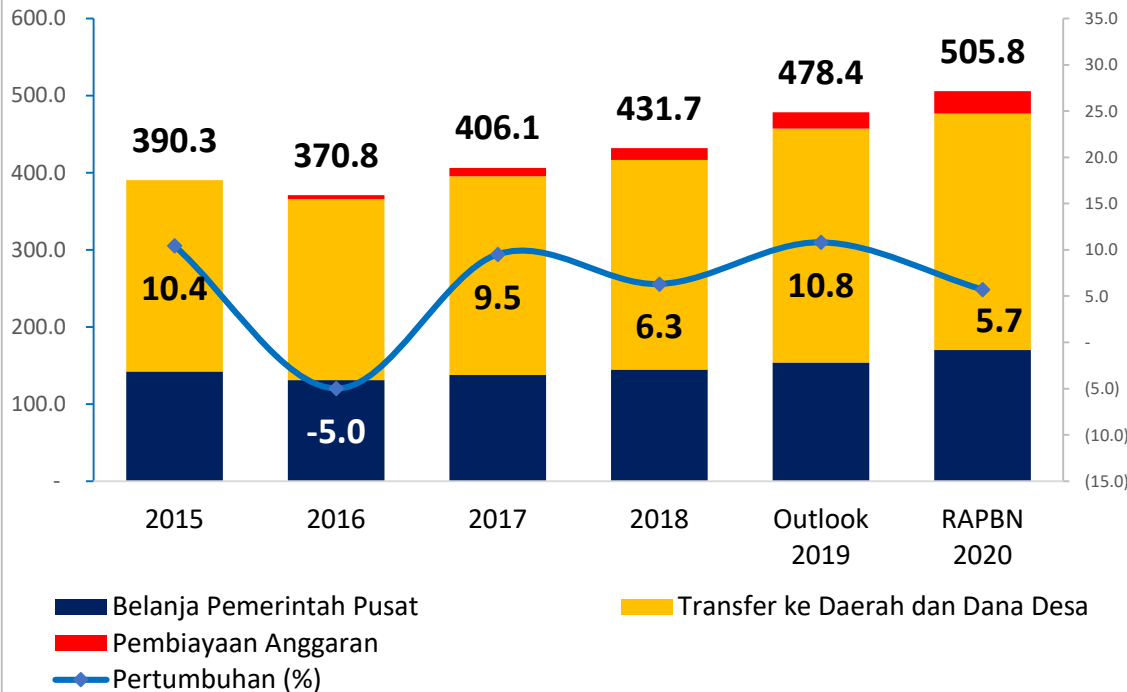
Belanja K/L tahun 2020 telah menampung:

1. Penguatan kualitas SDM a.l. KIP Kuliah, percepatan stunting, bantuan iuran JKN (kartu pra kerja dicadangkan untuk mempertajam program)
2. Penguatan program perlindungan sosial → bantuan pangan (kartu sembako) dan program keluarga harapan
3. Kegiatan strategis lainnya → percepatan pengembangan destinasi pariwisata, penanganan bencana, penguatan hankam



Anggaran Pendidikan diarahkan untuk perluasan akses pendidikan, peningkatan skill SDM, dan keberlanjutan pendanaan pendidikan

Triliun Rupiah



Alokasi Anggaran Pendidikan (Triliun Rupiah)

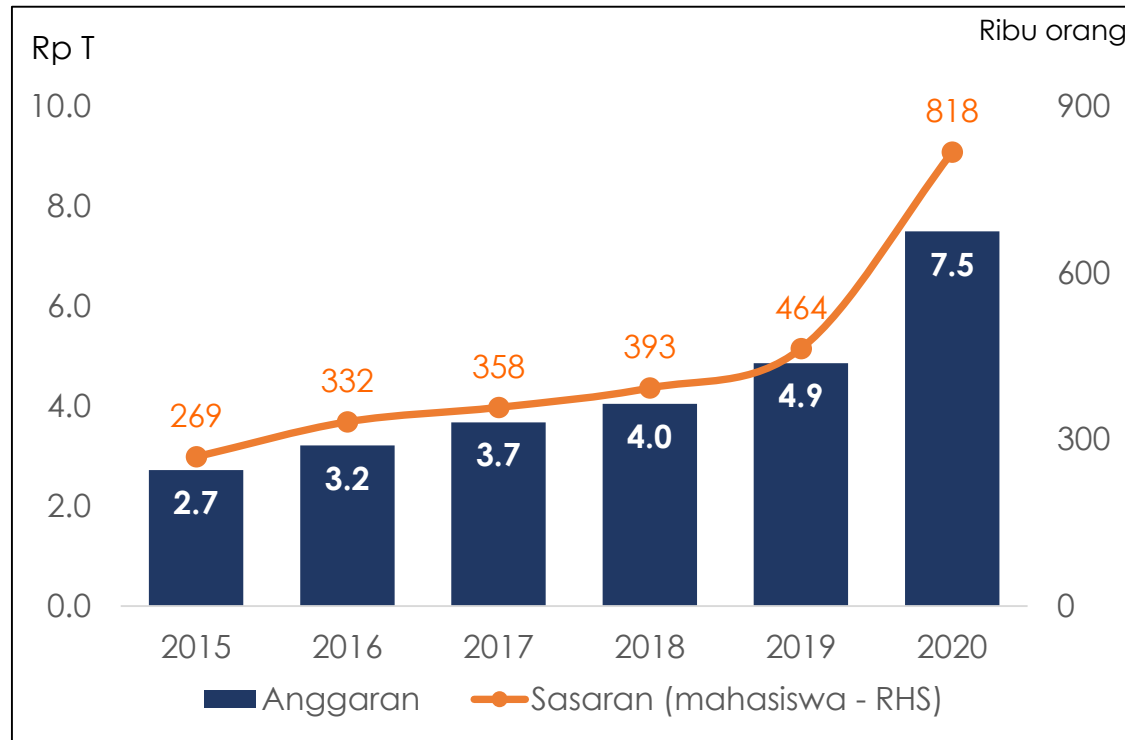
	2019	2020
1. Belanja Pemerintah Pusat	153,9	169,9
2. Transfer ke daerah dan dana desa	303,5	306,9
3. Pembiayaan (Dana Abadi)	21,0	29,0

Kebijakan Anggaran Pendidikan Tahun 2020

1. Perluasan akses pendidikan dari usia dini sampai dengan pendidikan tinggi
 - Melanjutkan bantuan pendidikan melalui KIP dan BOS
 - **KIP Kuliah** (perluasan/penyempurnaan bidik misi)
2. Melanjutkan **percepatan dan peningkatan kualitas sarpras pendidikan** (melalui Kemen PUPR dan DAK Fisik)
3. Meningkatkan kualitas dan keterampilan SDM
 - **Pendidikan vokasi** → penguasaan skill, entrepreneurship dan ICT sesuai kebutuhan industri
 - **Kartu Pra kerja**
4. Mendukung keberlanjutan pendanaan terkait pendidikan melalui investasi Pemerintah :
 - **Dana Pengembangan Pendidikan Nasional**
 - **Dana Abadi** Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, Penerapan, untuk mendukung invensi dan inovasi
 - **Dana Abadi** Perguruan Tinggi
 - **Dana Abadi** Kebudayaan



Program KIP Kuliah tahun 2020 dianggarkan Rp7,5 T, naik 53% dari program Bidik Misi tahun 2019, dengan sasaran 818 ribu mahasiswa/i



Bantuan Pendidikan meliputi:

- Biaya hidup : Rp4,2 juta/mhs/semester
- Biaya Pendidikan: Rp2,4 juta/mhs/semester

- KIP Kuliah ditujukan untuk memberikan kesempatan yang lebih luas bagi lulusan SMA tidak mampu untuk melanjutkan pendidikan lebih tinggi
- Agar setelah lulus dapat langsung bekerja → jurusan diutamakan vokasi/poltek/ sarjana Program Studi Sains dan Teknologi.

Kriteria penerima KIP Kuliah a.l.:

- a) Lulusan pemegang KIP.
- b) Diterima di PTN/PTS/prodi terakreditasi A/B.
- c) Dari keluarga tidak mampu dan penerima PKH

Sasaran penerima KIP Kuliah a.l.:

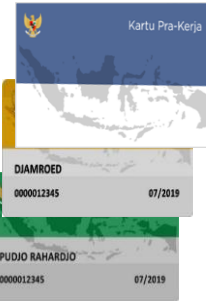
1. Dalam tahun 2020, sasaran penerima KIP Kuliah mencapai 818 ribu mencakup:
 - a. Lanjutan Bidik Misi untuk 398 ribu mahasiswa
 - b. Penerimaan mahasiswa baru 420 rb mahasiswa

Kartu Pra Kerja Untuk Peningkatan Produktivitas Pencari Kerja, dengan inovasi implementasinya melalui platform (digital)

- **Pelatihan vokasi:** meningkatkan keterampilan bagi yang belum bekerja dan yang akan berganti pekerjaan.
- Target tahun 2020 = **2 juta orang peserta**.
- Mendapatkan **dana insentif**, dengan waktu terbatas

Definisi Kartu Pra Kerja

"Kartu Pra Kerja merupakan kartu yang diberikan kepada pencari kerja atau pekerja untuk mendapatkan layanan pelatihan vokasi (**skilling** dan **re-skilling**) dan/atau sertifikasi kompetensi kerja"



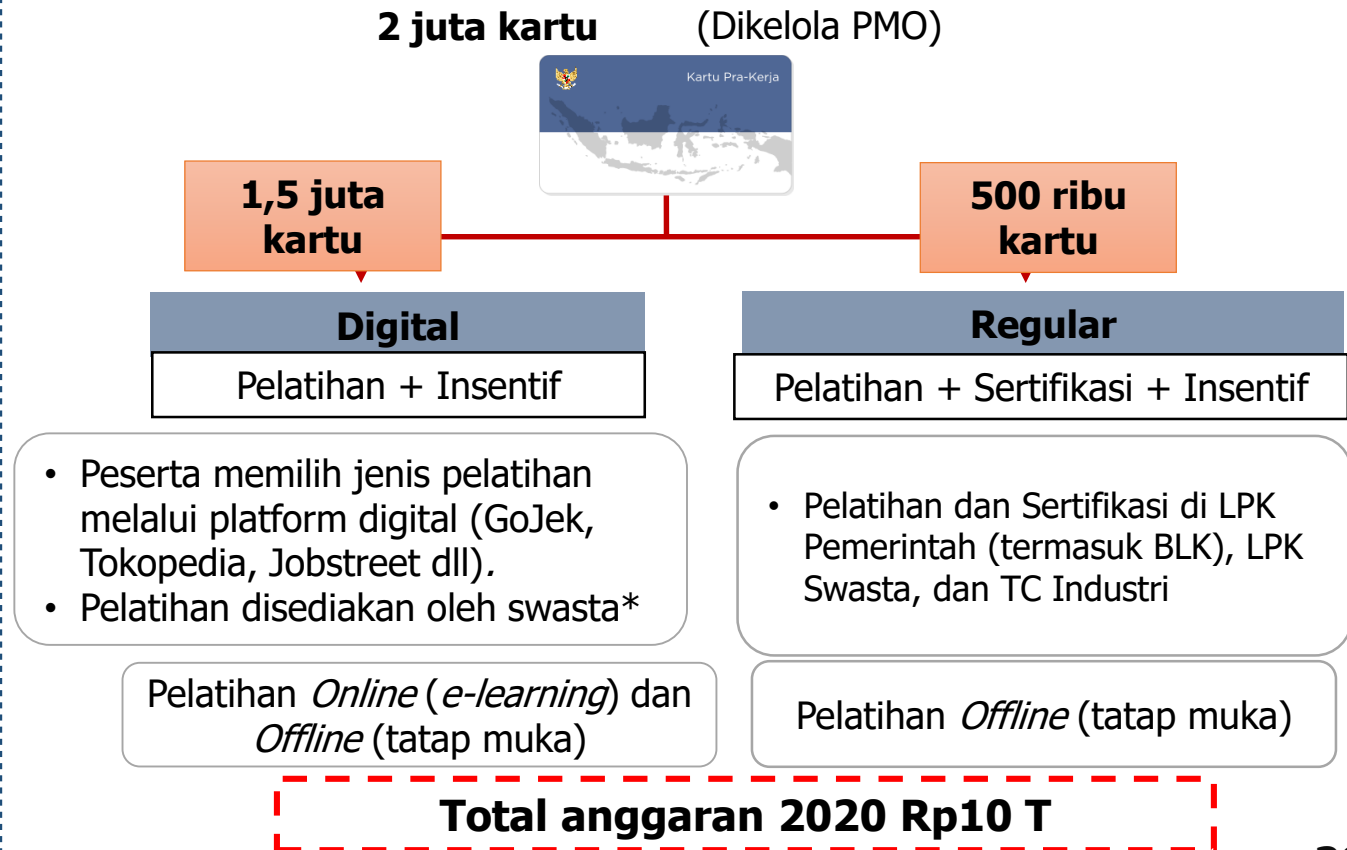
Skilling

Sasaran : Pencari kerja *fresh graduate*
Tujuan : *skill adjustment*, pembekalan *vocational skill* untuk bekerja
Outcome : mengurangi penganggur

Re-Skilling

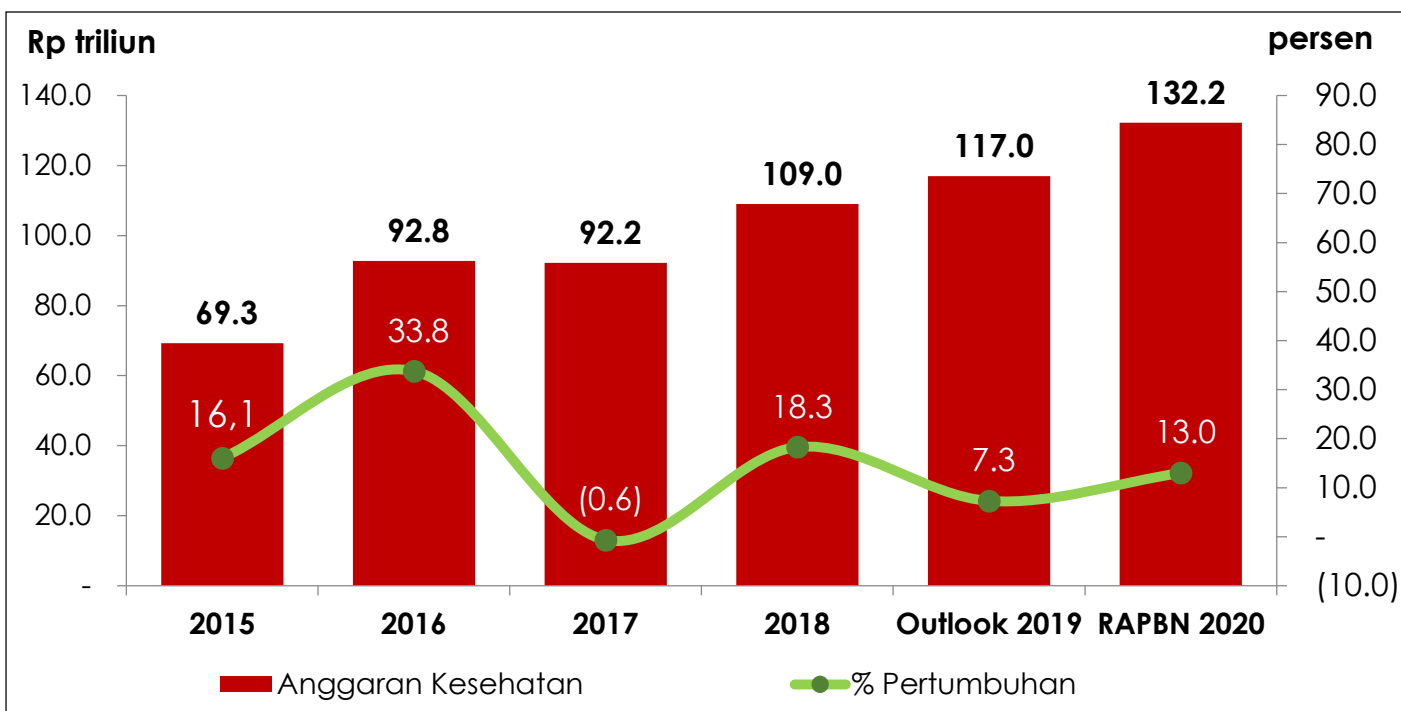
Sasaran : Pekerja ter-PHK atau berpotensi ter-PHK
Tujuan : pembekalan *vocational skill* yang berbeda/ baru untuk alih profesi/ wirausaha
Outcome : mencegah pengangguran kembali

Desain Implementasi Akses Digital dan Reguler





Anggaran Kesehatan 5% untuk meningkatkan akses dan kualitas layanan kesehatan, serta penguatan penanganan stunting



Kebijakan

1. Refocusing anggaran kesehatan

- mendorong peningkatan kualitas belanja kesehatan di daerah.
- penggalan pajak baru (*negative externalities*) untuk kesehatan.
- penguatan program promotif dan preventif a.l. program GERMAS .

2. Penguatan anggaran kesehatan untuk program *early childhood*

- meningkatkan nutrisi ibu hamil/menyusui dan balita.
- Akselerasi penurunan stunting.

3. Peningkatan dan pemerataan akses ke layanan kesehatan

- harmonisasi dan sinkronisasi K/L dan Pemda untuk pembangunan faskes.
- mendorong skema KPBU.

4. Peningkatan level efektivitas program JKN

- percepatan peningkatan kepesertaan non PBI,
- peningkatan kualitas layanan kesehatan,
- strategic purchasing* untuk efisiensi biaya manfaat,
- reviu besaran iuran PBI dan non PBI.

Tahun	Kartu Indonesia Sehat/PBI (jiwa)	Sertifikasi obat dan makanan	Persentase ketersediaan obat dan vaksin di Puskesmas	Kepesertaan ber-KB melalui peningkatan akses (jiwa)
2020	96,8 juta	74,0 ribu	95,0 %	31,6 juta
2019	96,8 juta	74,0 ribu	95,0 %	30,1 juta
2018	92,4 juta	72,8 ribu	86,0 %	29,8 juta

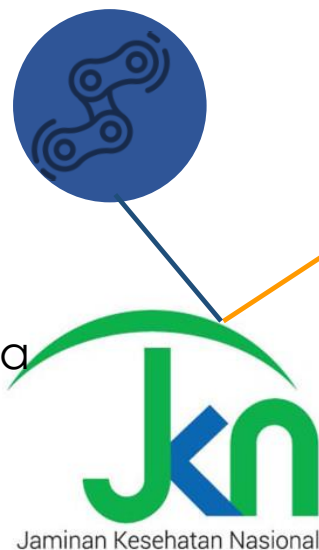


Untuk mendukung keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional, dilakukan berbagai kebijakan antara lain peningkatan PBI menjadi Rp48,8 T (dari sekitar Rp26,7 T tahun 2019)



1. Perbaikan sistem dan manajemen JKN

- ✓ Sistem kepesertaan dan manajemen iuran
 - database peserta
 - Optimalisasi kepesertaan badan usaha
- ✓ Sistem pelayanan (pencegahan *fraud*, perbaikan sistem rujukan, dan pengendalian dan efisiensi layanan)
- ✓ *Strategic Purchasing*
 - perbaikan sistem pembayaran dan pemanfaatan dana kapitasi
- ✓ Sinergitas antar penyelenggara jamsos
- ✓ Implementasi urun biaya (cost sharing/co-payment) dan selisih bayar
- ✓ Pengendalian biaya operasional.



2. Penguatan Peranan Pemda

- ✓ Mendukung peningkatan kepesertaan JKN (PPU BU dan PPBU)
- ✓ Pembiayaan JKN (pajak rokok, integrasi Jamkesda ke BPJS Kes)
- ✓ Penguatan promotive, preventif, dan supply side

3. Penyesuaian Iuran Peserta JKN

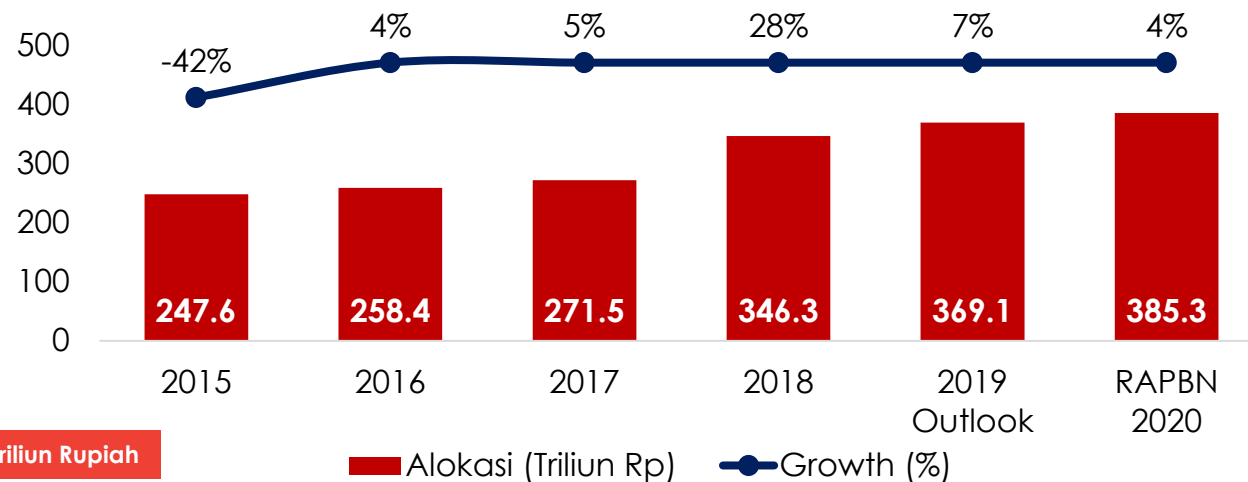
- ✓ Peningkatan anggaran PBI JKN oleh Pemerintah → ditujukan untuk menjamin kesinambungan layanan kesehatan yang berkualitas
(2019: Rp26,7 T → 2020: Rp48,8 T)
- ✓ Tarif iuran segmen non PBI disesuaikan dengan mempertimbangkan tingkat kolektabilitas



Percepatan pengurangan kemiskinan dan kesenjangan Tahun 2020 dilakukan melalui peningkatan bantuan pangan, PBI Program JKN, dan KIP Kuliah



Perlindungan Sosial dan Pengentasan Kemiskinan



Kebijakan Perlindungan Sosial Tahun 2020

1. Melanjutkan program perlindungan sosial seperti **PKH, PIP, dan Pembiayaan Ultra Mikro**.
2. Penguatan program perlindungan sosial melalui perluasan cakupan bidikmisi menjadi **KIP Kuliah**, transformasi Bantuan pangan menjadi **Kartu Sembako**, dan peningkatan anggaran dalam rangka menjamin kesinambungan **program JKN**
3. Peningkatan efektivitas dan efisiensi program pengelolaan **subsidi** yang dilakukan melalui upaya perbaikan ketepatan sasaran dan penyesuaian harga jual komoditas bersubsidi
4. Menyempurnakan kebijakan pengalokasian **Dana Desa** dengan tetap memperhatikan pemerataan, keadilan, pemberdayaan masyarakat desa, dan pengembangan potensi ekonomi desa
5. Peningkatan ketepatan sasaran menggunakan single data, pemanfaatan Information, Communications and Technology (ICT), serta penguatan monev.

2019 2020

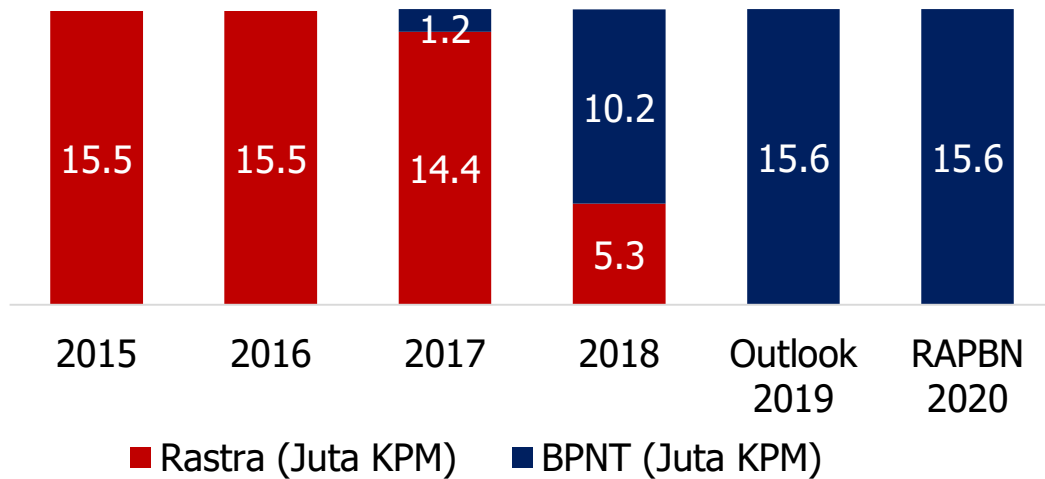
a.l.	PIP	11,2	11,1
	Bidikmisi/KIP Kuliah	4,7	7,5
	PKH	32,6	29,1
	B. Pangan/Kartu Sembako	20,4	28,1
	PBI JKN	26,7	48,8
	Subsidi (diluar Subsidi Pajak)	200,7	187,5
	Dana Desa	69,8	72,0
	Pembiayaan Ultra Mikro (UMi)	3,0	1,0



Perlindungan kepada masyarakat miskin untuk akses terhadap pangan diperkuat melalui kartu sembako menjadi Rp28,1 T (2019: Rp20,4 T)



SASARAN BANTUAN SOSIAL PANGAN/ KARTU SEMBAKO



Pengembangan bantuan pangan menjadi Kartu Sembako 2020

Rp28,1 T
Rp20,4 T

● 2020
● 2019

Bantuan Pangan (2019)

1. Penerima
✓ 15,6 juta KPM
2. Nilai Bantuan
✓ Rp110 rb/bulan
3. Komoditas
✓ Beras dan atau telur



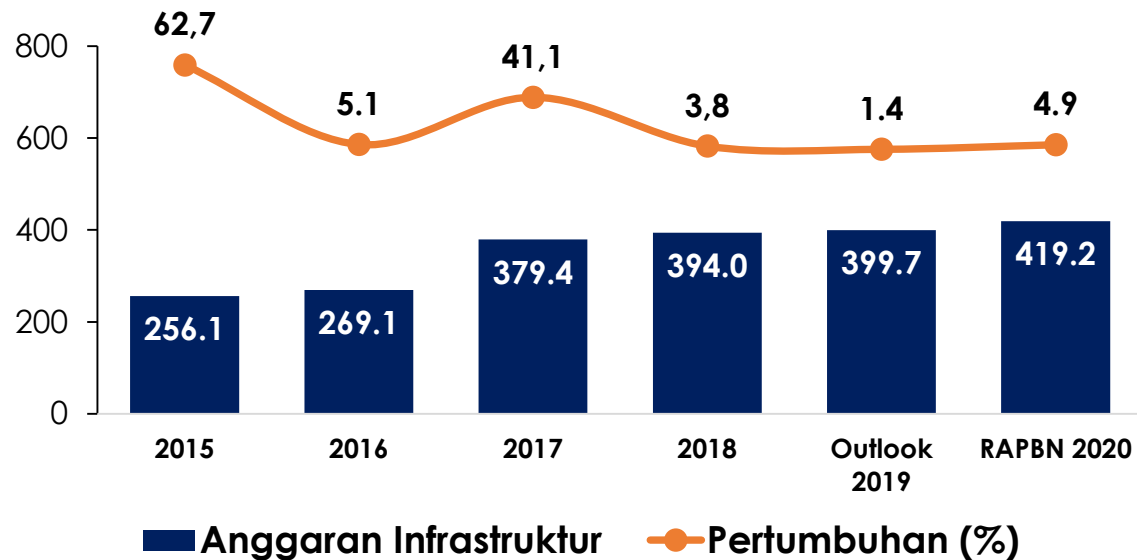
Perubahan

Kartu Sembako (2020)

1. Penerima
✓ 15,6 juta KPM
2. Nilai Bantuan
✓ **Rp150 rb/bulan**
3. Komoditas
✓ Beras dan atau telur
✓ Ditambah bahan pangan dengan **kandungan gizi lainnya**

Penguatan pembangunan infrastruktur melalui terobosan pembiayaan kreatif untuk akselerasi penuntasan infrastruktur

Triliun Rupiah



Sasaran dan Output Program Infrastruktur, 2018-2020

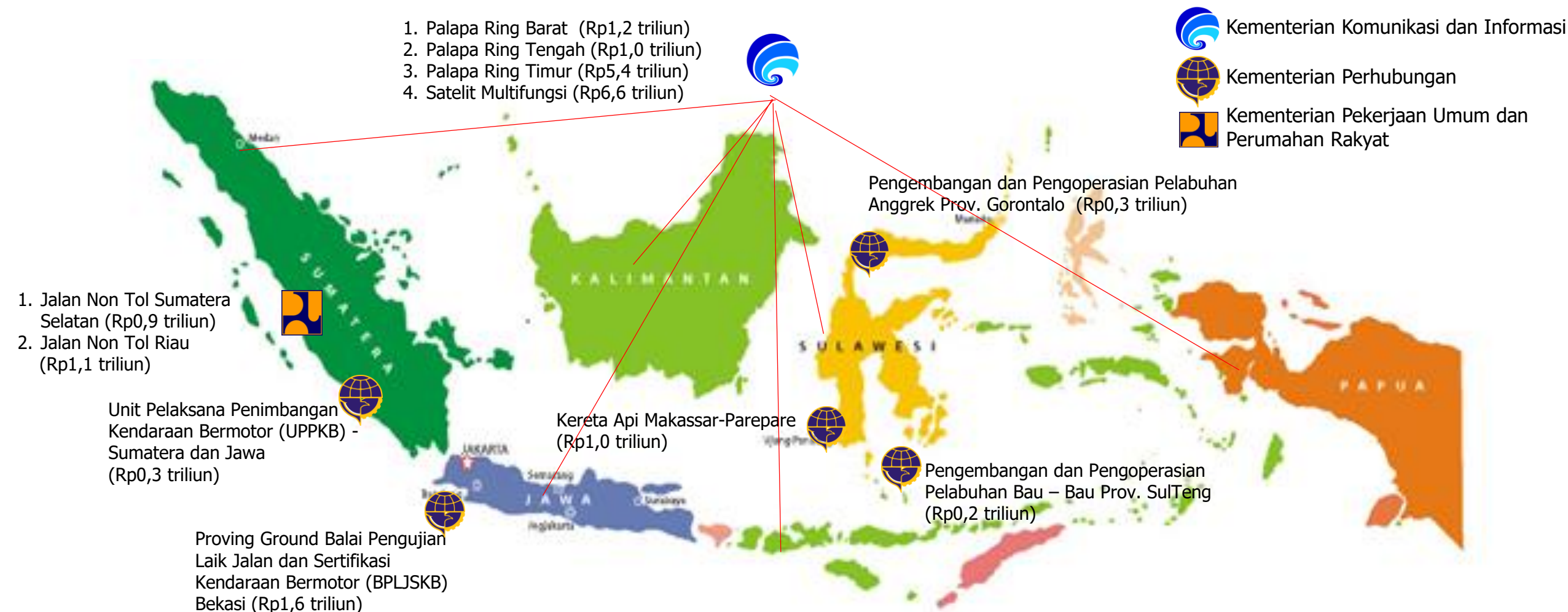
Tahun	Pembangunan Konektivitas		Pembangunan jalur KA (km'sp)	Penyelesaian Bandara Baru (lokasi)	Bendungan (unit)	Perumahan Untuk MBR	
	Jalan (km)	Jembatan (km)				Rusun (unit)	Rumah Khusus / Rusus (unit)
2020	837	6,9	238,8	3	49	5.224	2.000
2019	406	17,3	269,45	4	51	6.873	2.130
2018	766	16,6	351,45	4	46	11.670	4.525

KEBIJAKAN

1. Mendorong akselerasi pembangunan infrastruktur pendukung transformasi industrialisasi dan untuk merespon revolusi Industri 4.0;
2. Mendorong pembangunan infrastruktur di perkotaan untuk antisipasi urbanisasi (antara lain transportasi massal perkotaan, air bersih dan sanitasi, dan perumahan yang layak huni)
3. Mendorong peran swasta maupun BUMN dalam rangka membiayai proyek strategis nasional melalui skema pembiayaan kreatif
4. Mengoptimalkan opsi-opsi kerja sama KPBU sebagai strategi kebijakan pembiayaan jangka panjang di luar APBN
5. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral termasuk dengan Pemda selaras dengan target nasional
6. Meningkatkan komitmen untuk pembangunan sekaligus pemeliharaan infrastruktur terutama pada K/L yang terkait infrastruktur



Keterlibatan swasta/BUMN dalam pembangunan Infrastruktur terus didorong melalui KPBU, dengan potensi nilai proyek Rp19,7 T



Keterangan:

- Nilai tersebut merupakan nilai capex dan /atau estimasi nilai proyek
- Terdapat 11 proyek dengan potensi nilai sebesar **Rp19,7 triliun**



Reformasi Birokrasi diarahkan untuk mendukung birokrasi yang efisien, melayani, dan bebas korupsi



Penilaian Internasional:



- **Peringkat Government Effectiveness Index (GEI)** Indonesia naik 19 peringkat → dari peringkat 103 (tahun 2015) menjadi 84 (tahun 2017)
- **Peringkat E-Government Development Index (EDGI)** Indonesia naik 9 peringkat → dari peringkat 116 (tahun 2016) menjadi 107 (tahun 2018)

Kebijakan dan Program 2020:



Mendorong Reformasi Institusi: Transparansi dan Pelayanan Publik

- Peningkatan kualitas layanan publik, kemudahan, dan efisiensi → Mal Pelayanan Publik
- Cepat dan tanggap dalam merespon kebutuhan masyarakat → Penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik (*e-procurement*, satu data, satu peta)
- Mendorong profesionalisme ASN → rekrutmen berbasis komputer dan pelaksanaan UU ASN secara konsisten, seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi



Menjaga tingkat kesejahteraan aparatur dan pensiunan:

- Pemberian gaji dan pensiun ke 13 serta THR
- Mengantisipasi perubahan kebijakan pensiun

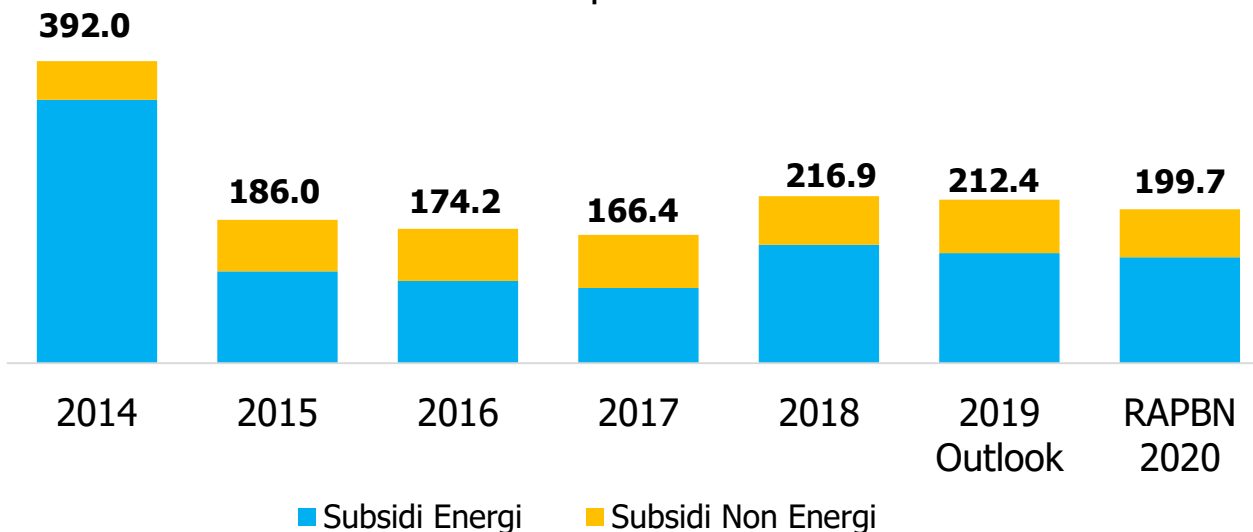


Subsidi diarahkan untuk peningkatan efektivitas dan efisiensi melalui upaya perbaikan ketepatan sasaran



Belanja Subsidi 2014-2020

Triliun rupiah



Subsidi Energi

■ RAPBN 2020 ● Outlook 2019
■ 137,5 T ● 142,6 T

Kebijakan :

- Melanjutkan pemberian subsidi tetap untuk solar dengan besaran subsidi menjadi Rp1.000/liter
- Subsidi selisih harga untuk minyak tanah dan LPG tabung 3 kg
- Subsidi listrik diberikan pada **golongan tarif tertentu**.
- Subsidi listrik diberikan secara tepat sasaran bagi pelanggan rumah tangga daya 450 VA dan 900 VA dengan mengacu pada DTPPFM.
- Meningkatkan rasio elektrifikasi dan mengurangi disparitas antarwilayah.

Subsidi Non Energi

■ RAPBN 2020 ● Outlook 2019
■ 62,3 T ● 69,8 T

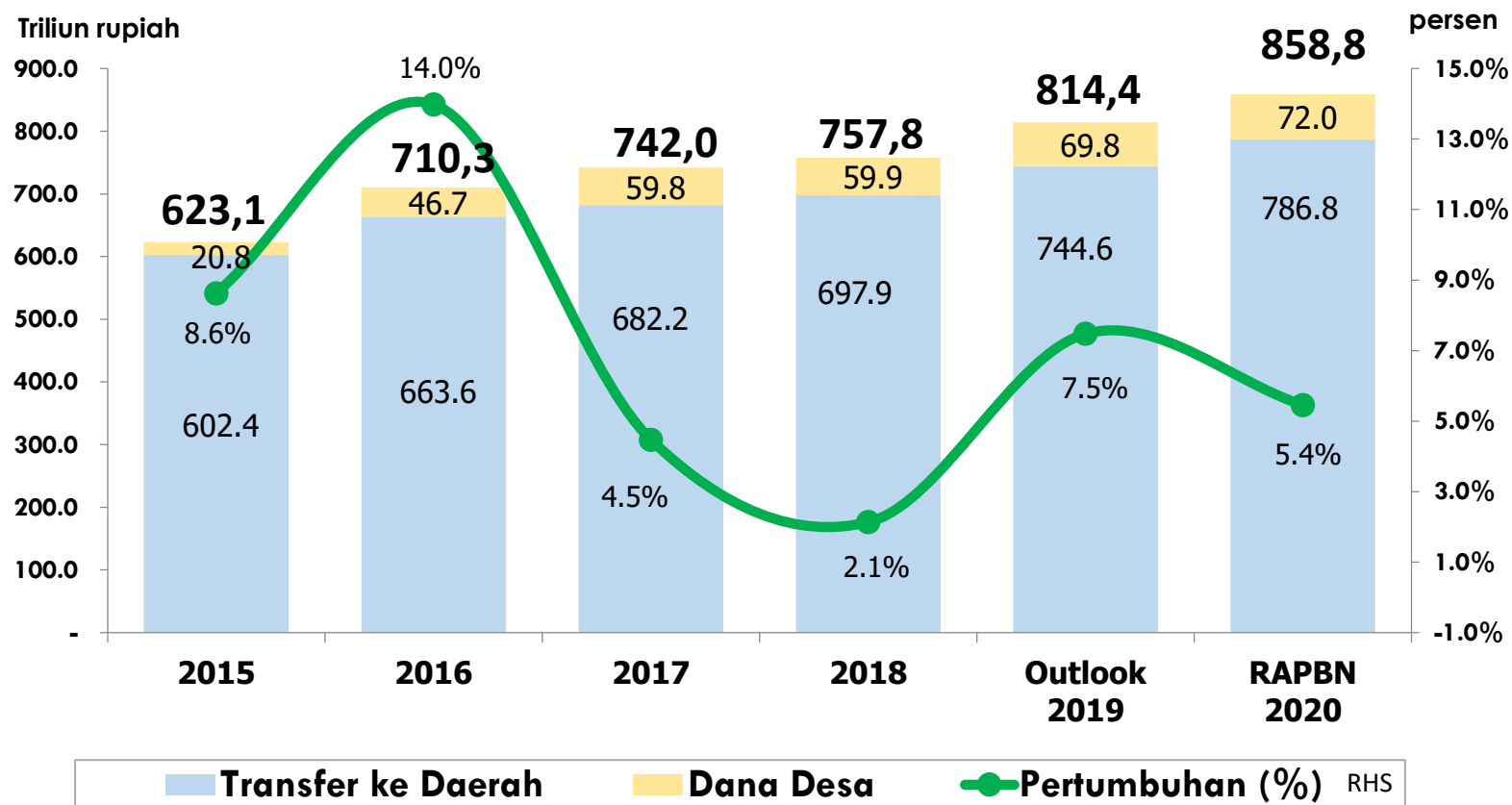
Kebijakan :

- Validasi data penerima dan kebutuhan penerima pupuk bersubsidi → **e-RDKK**
- Perluasan penggunaan Kartu Tani dalam pennebusan pupuk bersubsidi
- Peningkatan pelayanan umum di bidang transportasi dan informasi publik
- Memperluas **akses permodalan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)** melalui subsidi bunga KUR
- Pengalokasian subsidi bantuan uang muka perumahan dan subsidi selisih bunga kredit perumahan untuk mendorong kepemilikan rumah bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN 2020 (1)

Diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif

Transfer ke Daerah dan dana Desa, 2015-2020



Kebijakan Umum

untuk menopang kinerja seluruh pemerintah daerah dalam:

1. pemeratakan pelayanan dasar publik
2. menciptakan lapangan kerja dan mengentaskan kemiskinan
3. meningkatkan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah dalam rangka desentralisasi.

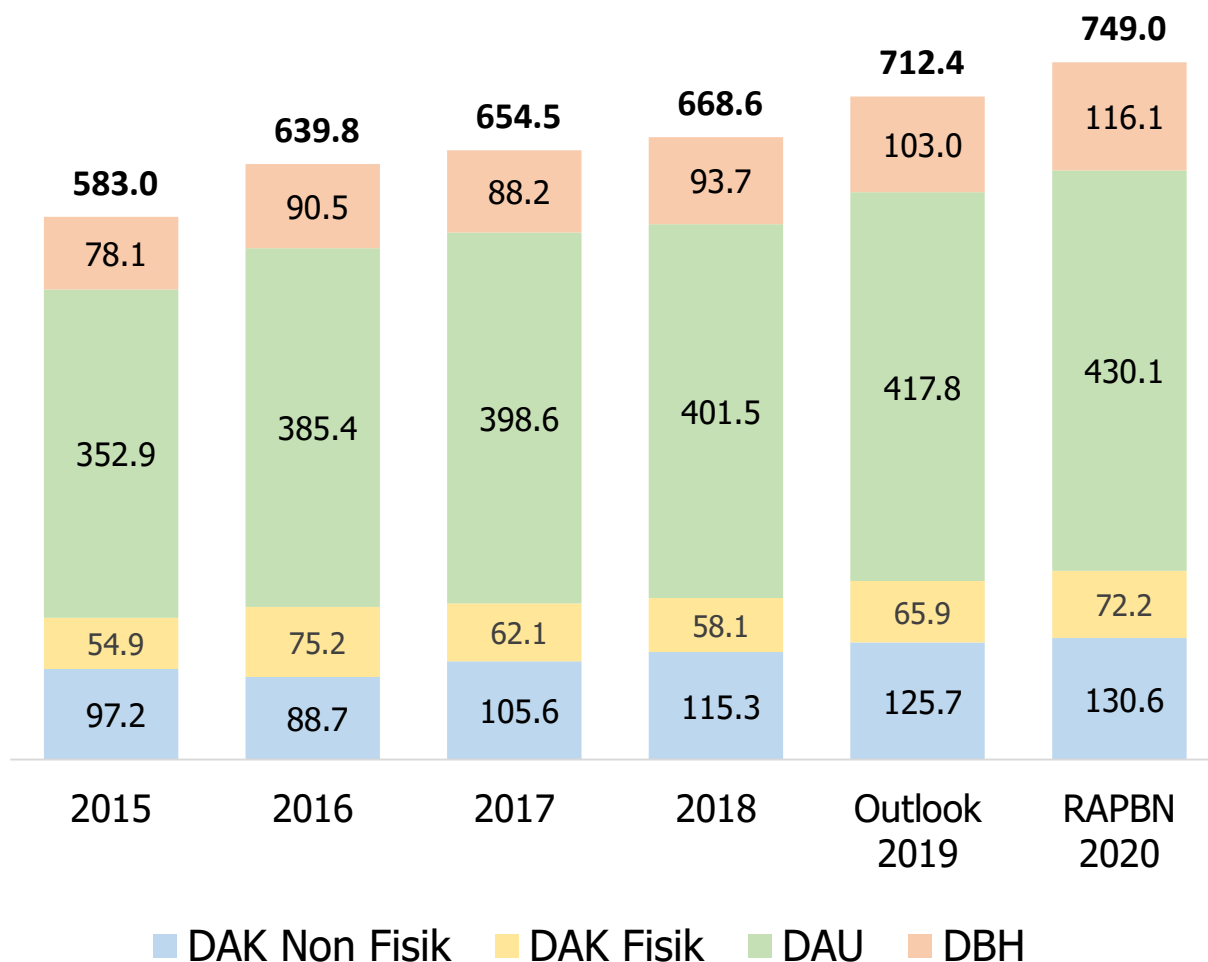


Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN 2020 (2)

Diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif



Dana Perimbangan, 2015-2020 (Triliun Rupiah)



DBH

- Menggunakan minimal 50% DBH Cukai Hasil Tembakau untuk program JKN.
- Memperkuat implementasi penggunaan 25 persen Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur.

DAU

- Dukungan pendanaan kelurahan, Siltap Perangkat Desa, dan Pegawai PPPK.
- Memperkuat implementasi penggunaan 25 persen Dana Transfer Umum untuk belanja infrastruktur.

DAK FISIK

- Melakukan restrukturisasi bidang DAK Fisik dengan mengalihkan beberapa bidang pada jenis reguler ke jenis penugasan.
- Penambahan Bidang Sosial dan Transportasi Laut.

DAK NON FISIK

- Meningkatkan kualitas SDM dan daya saing daerah.
- Menyempurnakan *unit cost* BOS (naik) dan pemutakhiran data sasaran penerima.

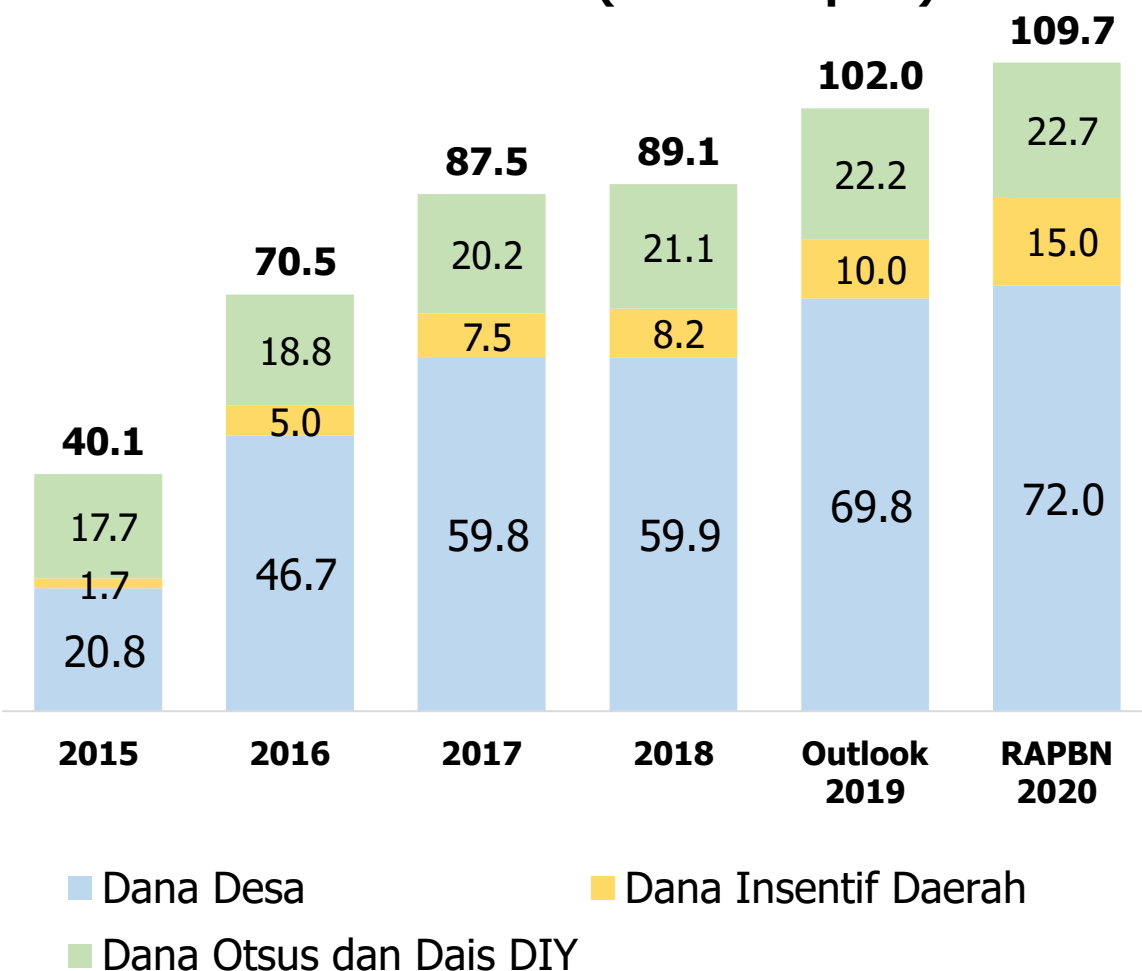


Transfer ke Daerah dan Dana Desa RAPBN 2020 (3)

Diarahkan untuk mendukung perbaikan kualitas layanan dasar publik, akselerasi daya saing, dan mendorong belanja produktif



Non Dana Perimbangan & Dana Desa, 2015-2020 (Triliun Rupiah)



Dana Insentif Daerah

- Memperkuat DID sebagai instrumen insentif yang lebih fokus untuk meningkatkan daya saing dan perbaikan kinerja daerah.

Dana Desa

- Meningkatkan porsi penggunaan dana desa untuk pemberdayaan masyarakat dan pengembangan potensi ekonomi.
- Mengoptimalkan peran APIP pemerintah daerah dalam pengelolaan dan penyampaian laporan penyaluran.
- Penguatan kapasitas SDM perangkat desa dan tenaga pendamping desa, serta penguatan monitoring dan evaluasi dana desa.
- Dana Desa **tahun 2019** rata-rata **Rp933,9 juta** per desa dan **tahun 2020** diperkirakan rata-rata **Rp960,6 juta** per desa.



CAPAIAN PEMANFAATAN DANA DESA, 2015-2018

MENUNJANG AKTIVITAS EKONOMI MASYARAKAT DAN MENINGKATKAN KUALITAS HIDUP MASYARAKAT DI DESA



Menunjang Aktivitas Ekonomi Masyarakat

- ☐ JALAN DESA
- ☐ JEMBATAN DESA
- ☐ PASAR DESA
- ☐ BUMDES
- ☐ TAMBATAN PERAHU
- ☐ EMBUNG
- ☐ IRIGASI
- ☐ SARANA OLAHRAGA

Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat Desa

- ☐ PENAHAN TANAH
- ☐ AIR BERSIH
- ☐ SARANA MCK
- ☐ POLINDES
- ☐ SUMUR BOR
- ☐ PAUD DESA
- ☐ DRAINASE
- ☐ POSYANDU

BERHASIL MENURUNKAN RASIO GINI DAN JUMLAH PENDUDUK MISKIN PEDESAAN

Rasio Gini Perdesaan

	2015	2016	2017	2018
Gini ratio	0,329	0,316	0,320	0,319



Penduduk Miskin di Desa

	2015	2016	2017	2018
Juta Jiwa	17,89	17,28	16,31	15,54
% penduduk miskin	14,09	13,96	13,47	13,10

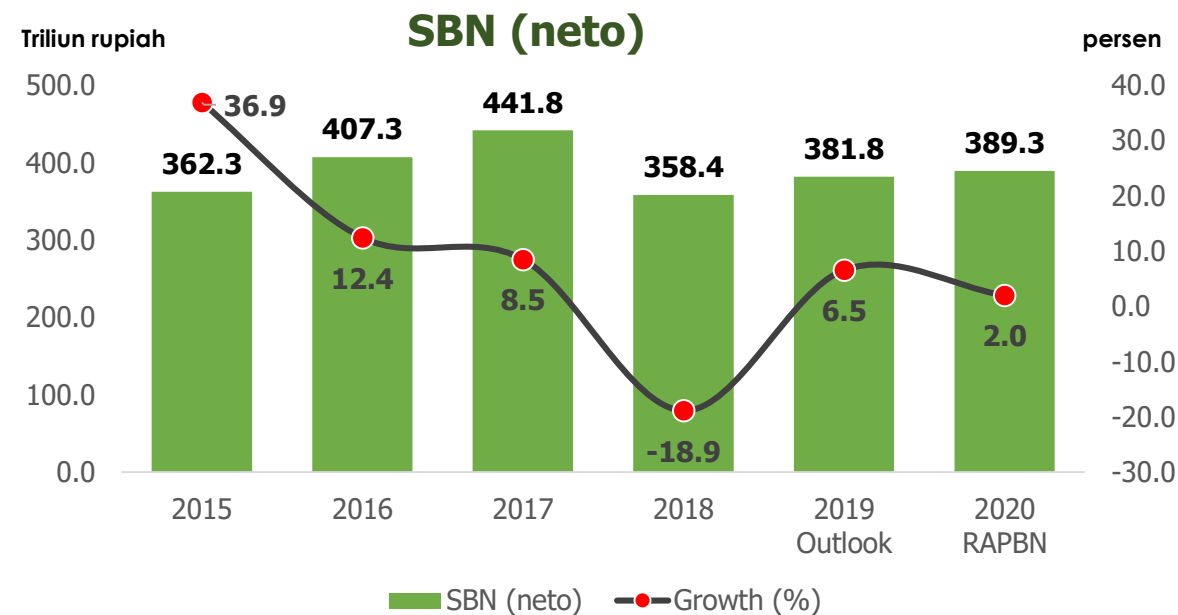
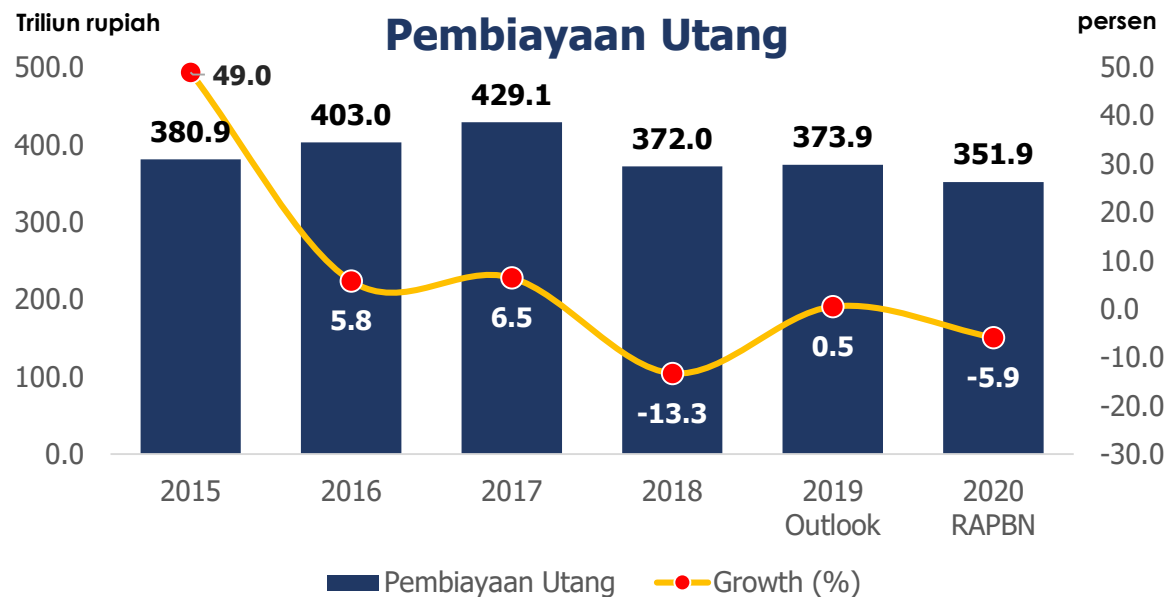




Kebijakan Pokok Pembiayaan Utang Tahun 2020



pembiayaan utang yang produktif, efisien, memenuhi aspek kehati-hatian serta didukung dengan tata kelola dan sistem manajemen risiko yang baik



Arah Kebijakan Pembiayaan Utang

Hati-hati

- **pengendalian rasio utang** dalam batas aman berkisar 29,4 – 30,1 persen PDB untuk mendukung kesinambungan fiskal
- Menjaga keseimbangan makro dengan **menjaga komposisi utang domestik dan valas** dalam batas terkendali serta pendalaman pasar keuangan

Efisiensi

Terciptanya efisiensi biaya utang

Produktif

pemanfaatan utang untuk kegiatan produktif;



Strategi Pembiayaan Utang

- **Meningkatkan efisiensi biaya utang**
- **Mengoptimalkan peran serta masyarakat** dalam pasar obligasi domestik (*financial deepening*)
- **Pengelolaan utang secara aktif** melalui manajemen kewajiban dan aset.
- **Mengelola pinjaman luar negeri secara selektif**

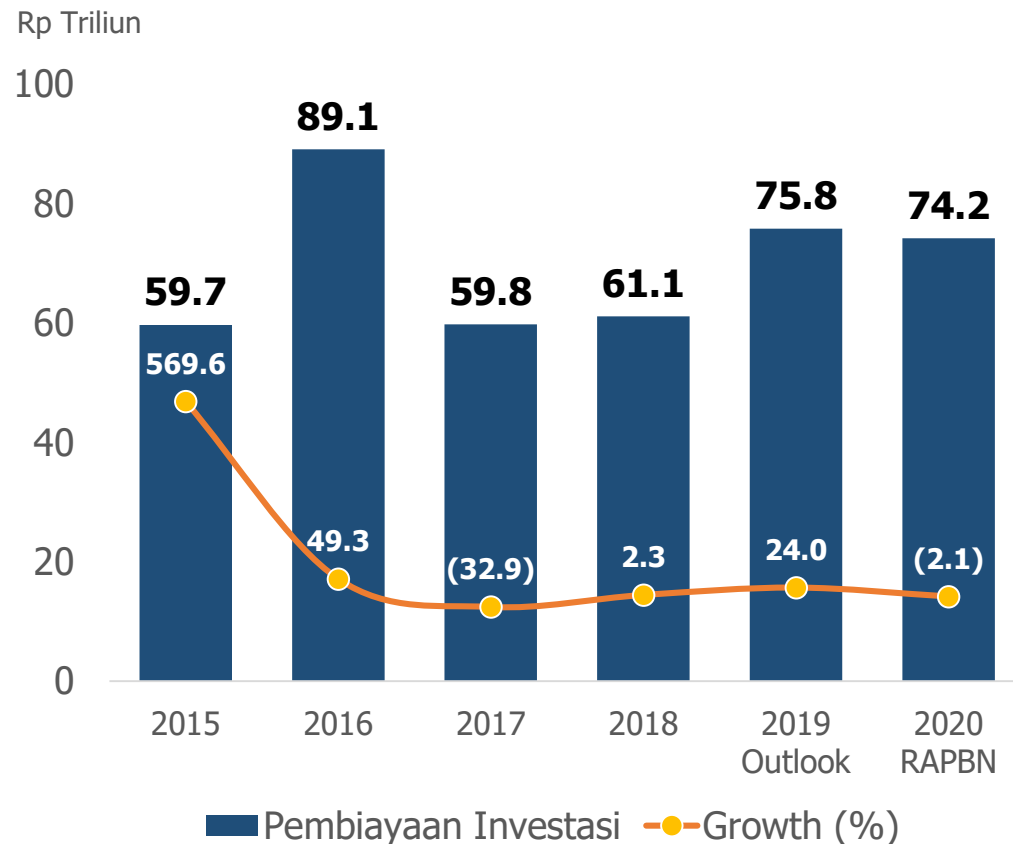


Pembiayaan Investasi Tahun 2020



Selain meningkatkan kualitas pendidikan dan percepatan pembangunan infrastruktur, juga mendorong ekspor nasional dan meningkatkan daya saing bangsa

Perkembangan Pembiayaan Investasi



Meningkatkan Daya saing Bangsa

- Investasi Pemerintah untuk Dana Abadi Pendidikan, Penelitian, kebudayaan, dan perguruan tinggi
- Pemanfaatan hasil investasi dana abadi untuk meningkatkan akses masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, pemajuan kebudayaan nasional, dan peningkatan kualitas perguruan tinggi

Mendorong Program Ekspor Nasional

- PMN kepada LPEI untuk memberikan pembiayaan, penjaminan dan asuransi dalam rangka menghasilkan barang dan jasa yang menunjang ekspor
- Mendukung kebijakan penguatan neraca transaksi berjalan Indonesia

Dana Abadi untuk Pendidikan

Pemanfaatan hasil investasi dana abadi untuk meningkatkan akses masyarakat pada jenjang pendidikan tinggi, peningkatan kualitas riset, pemajuan kebudayaan nasional, dan peningkatan kualitas perguruan tinggi.

- ✓ **Dana Pengembangan Pendidikan Nasional**
 - hasil investasi DPPN tahun 2020 untuk 5.000 orang mahasiswa baru, 11.000 orang mahasiswa lanjutan, serta mendanai 75 riset.
- ✓ **Dana Abadi Penelitian**
 - meningkatkan kuantitas dan kualitas riset, terutama riset pada sektor-sektor yang memiliki potensi *multiplier effect* yang besar.
- ✓ **Dana Abadi Kebudayaan**
 - menjamin keberlangsungan upaya pemajuan kebudayaan bagi generasi berikutnya melalui peningkatan kapasitas SDM kebudayaan dan lembaga kebudayaan.
- ✓ **Dana Abadi Perguruan Tinggi**
 - untuk pengembangan SDM, serta sarana dan prasarana dalam mewujudkan Perguruan Tinggi di Indonesia menuju *World Class University*.





Kesimpulan



- 1 Risiko perlambatan ekonomi global di tahun 2019 dan 2020 diperkirakan semakin nyata sehingga Pemerintah harus mengantisipasi dampaknya pada perekonomian nasional termasuk antisipasi kebijakan fiskal ke depan**
- 2 APBN tahun 2020 dirancang untuk mendukung akselerasi peningkatan daya saing dan kualitas sumber daya manusia**
- 3 Postur Rancangan APBN tahun 2020 diarahkan tetap ekspansif mendorong perekonomian dengan sasaran yang lebih terarah dan terukur**
 - Penerimaan negara terus dioptimalkan sebagai sumber penerimaan sekaligus menjadi instrumen untuk menstimulasi perekonomian
 - Belanja Negara Tahun 2020 fokus mendukung pelaksanaan prioritas pembangunan khususnya pembangunan SDM
 - Pembiayaan Anggaran yang efisien untuk kegiatan produktif



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Terima Kasih